



**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PENYANDANG  
DISABILITAS TUNA RUNGU ANGGOTA DPC GERKATIN  
JAKARTA SELATAN PADA PILKADA GUBERNUR DKI JAKARTA  
TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S. Sos)  
Program Studi Ilmu Politik**

**Oleh**

**Retno Herningrum Pratiwi  
NIM 3312415051**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia  
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 2 April 2020

Pembimbing Skripsi



Martien Hema Susanti, S.Sos., M.Si.

NIP. 197303312005012001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.,

NIP. 196211201987021001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 18 Juni 2020

Penguji I



Moh. Aris Munandar, S.Sos, M.M.  
NIP. 197207242000031001

Penguji II



Erisandi Arditama S.IP, M.A  
NIP. 198705012018031001

Penguji III



Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197303312005012001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



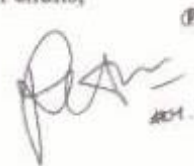
UNNES  
Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.  
NIP. 196308021988031001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 Maret 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Retno', with a small circular mark above it and some scribbles below.

Retno Herningrum Pratiwi

NIM. 3312415051

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S. Al Insyirah : 5-8)
- ❖ Tidak ada yang bisa menghancurkan besi, tetapi karatnya bisa. Demikian juga, tidak ada yang bisa menghancurkan seseorang. Tetapi pola pikirnya bisa. (Unknown)
- ❖ Apabila tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. (Erisandi Arditama)
- ❖ Semakin sering kita bersujud, akan semakin banyak harapan yang cepat terwujud. (Retno Herningrum Pratiwi)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Herry dan Ibu Tri, kakak saya Tyas, dan adik saya Bram, yang selalu memberi dukungan moril, materi dan doa.
2. Almamater tercinta, Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang.

## SARI

Pratiwi, Retno Herningrum. 2020. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si. 167 halaman.

### **Kata Kunci :Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Penyandang Disabilitas**

Partisipasi politik adalah salah satu aspek yang penting dalam suatu negara yang berlandaskan asas demokrasi. Dalam pelaksanaannya, setiap warga negaranya memiliki hak yang sama, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pada kegiatan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dibutuhkan partisipasi politik dari seluruh masyarakat DKI Jakarta dan tidak terkecuali penyandang disabilitas tuna rungu yang kurang mendapat perhatian dari banyak pihak. Pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu perlu mendapatkan sosialisasi agar terwujudnya asas demokrasi yang adil bagi setiap masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota Gerkatina dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, dan 2) Mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota Gerkatina dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada Komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATINA) cabang Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Bentuk partisipasi pemilih pemula penyandang disabilitas hanya sebatas mengikuti diskusi politik dan menggunakan hak pilihnya secara sukarela ketika Pilkada Gubernur DKI Jakarta pada putaran satu dan dua. Diskusi politik yang dilakukan hanya sebatas membahas secara umum mengenai hak-hak disabilitas dengan teman. Ketika Pilkada berlangsung, mereka menggunakan hak pilihnya sebagai salah satu upaya mereka menekan angka golput. 2) Faktor penghambat pemilih pemula disabilitas adalah tidak adanya pendampingan dari pihak keluarga atau petugas TPS, ketika pemilihan berlangsung tidak mendengar namanya dipanggil, tidak adanya keterangan disabilitas dalam surat undangan dan kurangnya sosialisasi tentang informasi pemilihan dari pihak KPU, yakni kurangnya tenaga penerjemah atau interpreter pada saat itu.

Saran yang dapat penulis berikan antara lain: 1) Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan mengenai sosialisasi pemilihan kepada kalangan disabilitas khususnya pada umumnya, dan tuna rungu atau tuli di organisasi Gerkatina; 2) Diharapkan pada Pilkada mendatang terdapat label khusus di dalam surat undangan untuk memberikan informasi bahwa pemilih memiliki kekurangan secara fisik; 3) Diharapkan kedepannya DPC Gerkatina Jakarta Selatan dapat membantu sosialisasi pemilu kepada anggotanya, menekan angka golput dikalangan pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu dan memberi data terbaru kepada pihak KPU DKI Jakarta terkait jumlah pemilih tuna rungu.

## ABSTRACT

Pratiwi, Retno Herningrum. 2020. Political Participation of beginner Voters with Disabilities in the DKI Jakarta Governor Election in 2017. Thesis. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Advisor Martien Herna Susanti, S.Sos. M,si. 167 Pages.

**Keywords : Political Participation, Beginner Voters, People with Disabilities**

Political participation is one of the important aspects in a country based on democratic principles. In practice, every citizen has the same rights, including persons with disabilities. In the 2017 DKI Jakarta Regional Election activities, political participation is needed from all the people of DKI Jakarta and there are no exception for people with hearing impairments who have received less attention from many parties. Voter beginners with hearing impairment need to get socialization in order to realize the principle of democracy that is fair for every community. The purpose of this study is 1) Knowing the form of political participation of novice voters with hearing impairment members of GerkatIn in the 2017 DKI Jakarta Governor Election, and 2) Knowing factors that inhibit the participation of novice voters with hearing impaired members of the GerkatIn in the 2017 DKI Jakarta Governor Election.

This study uses qualitative research methods with data collection techniques that include interviews and documentation. This research was conducted at the Movement Community for the Deaf Welfare Indonesia (GERKATIN) South Jakarta branch. The results of this study indicate that: 1) The form of participation of novice voters with disabilities is limited to following political discussion and exercising their right to vote voluntarily when the Governor Election of DKI Jakarta in rounds one and two. Political discussion is only limited to discussing general disability rights with friends. When the elections took place, they used their right to vote as one of their efforts to suppress abstentions. 2) Factors inhibiting voter disability for voters are the absence of assistance from family or polling station officials, when the election takes place do not hear his name being called, the absence of disability information in the invitation letter and the lack of socialization about election information from the KPU, namely the lack of translators or interpreters on at that time.

Suggestions that the author can give include: 1) It is hoped that the government will pay more attention to the election socialization to the disability especially in general, and deaf or deaf people in the GerkatIn organization; 2) It is expected that in the upcoming elections there will be a special label in the invitation letter to provide information that voters have physical deficiencies; 3) It is hoped that in the future DPC GerkatIn South Jakarta can assist the election socialization to its members, reduce the number of abstentions among novice voters with hearing impairments and provide updated data to the DKI Jakarta KPU regarding the number of deaf voters.

## **PRAKATA**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fahtur Rokhman, M. Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Tijan, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Politik Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang.
4. Ibu Martien Herna Susanti, S. Sos., M. Si, selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan keilmuannya dalam memberikan bimbingan, pengarahan, serta saran dalam proses penyusunan ini supaya lebih baik.
5. Bapak Moh. Aris Munandar S.Sos, MM, selaku dosen penguji I yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya dalam menguji skripsi saya supaya menjadi lebih baik.



6. Bapak Erisandi Arditama S.I.P., M.A. selaku dosen penguji II yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya dalam menguji skripsi saya supaya menjadi lebih baik.
7. Bapak/Ibu Dosen serta Petugas Tata Usaha Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang tak henti-hentinya mendukung saya untuk sukses selama masa pendidikan.
8. Kedua orang tua saya, bapak Herry Marwanto dan ibu Tri Saptami S.E. yang senantiasa mendoakan saya selama pengerjaan skripsi ini.
9. Kakak Tyas dan dek Bram yang senantiasa menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Keluarga Besar Organisasi DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Jakarta Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan memberi informasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini di sela-sela kesibukan.
11. Teman-teman Ilmu Politik Angkatan 2015 Universitas Negeri Semarang yang senantiasa membantu satu sama lain.
12. Wilia Desi S.E., Savira Indriyani S.Ars., Saras Tejongrum S.I.Kom., dan Syahzanan Haunan Fatharani S.Ds., teman yang selalu memberikan nasihat serta bantuan selama proses pengerjaan skripsi ini.
13. Brahmantiyo Prakoso S.T. sebagai pasangan yang selalu memberikan saran serta nasihat selama proses pengerjaan skripsi ini.

14. Saudara, teman, dan sahabat yang selalu mendoakan saya atas kebaikan serta kelancaran tersusunnya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Hanya Ucapan terima kasih serta untaian doa yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan imbalan atas kebaikan yang telah diberikan berbagai pihak kepada penulis. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat kedepannya. Aamiin.

Semarang,

Penulis,

NIM. 3312415051

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
SARI .....	vi
ABSTRACT .....	vii
PRAKATA .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat penelitian .....	16
E. Batasan Istilah .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Deskripsi Teoritis .....	23
1. Partisipasi Politik .....	23
2. Pemilih Pemula .....	40
3. Penyandang Disabilitas .....	44
4. Pemilihan Kepala Daerah .....	53
5. Organisasi .....	61
B. Penelitian yang Relevan .....	83
C. Kerangka Berpikir .....	88
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>90</b>
A. Dasar Penelitian .....	90

B. Lokasi Penelitian.....	92
C. Fokus Penelitian.....	92
D. Sumber Data Penelitian.....	93
E. Teknik Pengumpulan Data.....	95
F. Uji Validitas Data .....	97
G. Teknik Analisis Data.....	97
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>101</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	101
B. Hasil Penelitian .....	110
1. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 .....	110
2. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 .....	124
C. Pembahasan.....	130
1. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 .....	130
2. Faktor Penghambat Partisipasi Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017.....	135
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>138</b>
Kesimpulan .....	138
Saran .....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>145</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik .....	32
Tabel 2. Daftar Pemilih Tetap Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 .....	128

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kartu Anggota DPC Tampak Depan dan Belakang.....	107
Gambar 2. Alamat DPC GERKATIN Jakarta Selatan.....	109
Gambar 3. Kondisi Kantor Sekretariat DPC Gerkatina Jakarta Selatan.....	109
Gambar 4. Grup <i>WhatsApp</i> DPC Gerkatina Jakarta Selatan .....	115
Gambar 5. Kegiatan Kampanye Salah Satu Calon Gubernur DKI Jakarta.....	116
Gambar 6. Daftar Pemilih Tetap Pilkada DKI Jakarta .....	129
Gambar 7. Contoh Surat Undangan Pilkada .....	138

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Piramida Partisipasi Politik.....	37
Bagan 2. Kerangka Berpikir.....	88

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas .....	145
Lampiran 2. Instrumen Penelitian .....	147
Lampiran 3. Pedoman Wawancara .....	152
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi .....	155
Lampiran 5. Daftar Susunan Pengurus DPC GerkatIn Jakarta Selatan .....	156
Lampiran 6. Hasil Wawancara .....	157



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Partisipasi politik adalah salah satu aspek yang dapat dikatakan penting dalam suatu negara yang berlandaskan asas demokrasi. Partisipasi dari masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan arah politik suatu daerah ataupun negara. Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki suatu peranan dalam memberikan arah politik pada suatu daerah. Bagi seluruh masyarakat yang telah berusia 17 tahun keatas dan/atau telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih juga mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum (pemilu).

Dalam sistem demokrasi, berpartisipasi dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak tersebut menyangkut hak untuk menyelidiki atau menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih (Dahl, 2001:68).

Secara yuridis, pemilihan umum adalah sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjudil) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, maka dari itu, partisipasi politik dari masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi salah satu faktor yang terpenting,

sebab legitimasi dari hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik dari kalangan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya ketika pemilihan umum diselenggarakan. Dapat dikatakan pula bahwa partisipasi langsung dari masyarakat adalah esensi penting sebagai pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan berpolitik yang absah dan dilakukan oleh rakyat dalam sistem demokrasi. Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum dapat membantu pemerintah untuk memahami apa yang mereka kehendaki.

Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai suatu perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Korelasi partisipasi politik baik secara individu ataupun secara kelompok dengan cara pemilihan umum yang memiliki tujuan untuk memilih seorang pemimpin beserta wakil.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik terdorong oleh keyakinan bahwa dengan kegiatan tersebut merupakan media penyaluran kepentingan. Selain itu, masyarakat juga percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek politik. Sehubungan dengan pembahasan tentang partisipasi politik

Wujud dari pemenuhan hak-hak berpolitik adalah dengan adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang di dalam UUD 1945 pasal

28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut dan berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi bukti bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi (*to protect*), memajukan (*to promote*), menegakan dan memenuhi (*to fulfill*), serta menghormati (*to respect*) hak-hak asasi manusia.

Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Lebih lanjut Pasal 28 I ayat (2) berbunyi, “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat

diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang atau warga negara memiliki kedudukan yang sama dan harus diperlakukan secara sama rata tanpa perbedaan oleh Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 5 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pada pelaksanaan pemilihan umum baik ketika berlangsungnya pemilihan maupun pada saat kegiatan kampanye mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat termasuk juga partisipasi dari para penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak sama dengan masyarakat lainnya. Dalam kegiatan kampanye partisipasi penyandang disabilitas masih sangat minim. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat disabilitas diartikan sebagai mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual maupun sensorik yang dialami dalam jangka waktu yang lama.

Walaupun demikian sebenarnya bukan hal yang tidak mungkin, bahwa mereka para penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli berpartisipasi dalam kegiatan kampanye selama mempunyai keinginan yang kuat dan ditunjang akses serta fasilitas yang baik. Penyandang disabilitas di Indonesia terhitung cukup banyak jumlahnya sehingga tidak bisa diabaikan keberadaannya di sekitar kita.

Ketika menghadapi pemilu, penyandang disabilitas tuna rungu akan berhadapan dengan hambatan dan kendala yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi dan efektif di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional sangat perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. Sejauh ini, mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan agar bisa bertindak dan beraktivitas sesuai dengan kondisi mereka (Daulay, 2013:1).

Masih terjadi pengabaian hak politik penyandang disabilitas khususnya pemilih pemula tuna rungu dalam Pemilu, antara lain (Muladi, 2009:261) hak untuk didaftar guna memberikan suara, hak atas akses ke TPS, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif, hak atas informasi termasuk

informasi tentang pemilu, hak untuk ikut menjadi pelaksana dalam pemilu.

Selain beberapa pokok hak – hak penyandang disabilitas di atas, terdapat pula hak lain yang harus di dapatkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu dalam pemilu. Ketika pemungutan suara, penyandang disabilitas dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya. Penyandang disabilitas dengan jenis kekurangan tuna rungu dan kekurangan fisik lainnya harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan layar untuk pemanggilan nomor untuk mempermudah mereka dalam memilih pilihannya.

Adapun beberapa hambatan dan kendala yang seringkali terjadi pada penyandang disabilitas saat pelaksanaan pemilu yaitu seringkali tidak diperhitungkannya hak suara dari penyandang disabilitas yang juga sering dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki. Faktor lainnya adalah kurangnya transparansi data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penyandang disabilitas serta jumlah dan juga posisi penyandang disabilitas tidak terpetakan sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal tersebut dapat terjadi karena keengganan petugas pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang di data dan juga diduga

adanya kecurangan dari pihak petugas pendata yang tidak mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas.

Walaupun dalam peraturan yang tertulis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan mengenai kebutuhan para penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan, hak berpolitik penyandang disabilitas terutama tuna rungu dirasa masih belum maksimal. Baik masyarakat lain ataupun petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang seringkali menganggap remeh mereka para penyandang disabilitas, maka dari itu ada beberapa para kelompok kepentingan yang memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas mulai marak bermunculan baik di tingkat nasional ataupun lokal.

Kesadaran para pemilih pemula penyandang disabilitas khususnya tuna rungu untuk berpartisipasi pada pemilu sangatlah perlu untuk ditingkatkan. Karena akan sangat memengaruhi tingkat golput pada pemilu yang mendatang. Mengingat pentingnya untuk mengetahui dan mengurai secara lebih mendalam tentang partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu yang merupakan kelompok yang minoritas di masyarakat, baik saat berlangsungnya kegiatan kampanye ataupun saat pelaksanaan pemilu merupakan salah satu dari perwujudan dari prinsip

keterbukaan yang merupakan hak universal bagi setiap warga pada Negara demokrasi seperti di Indonesia.

Tingkat kesadaran akan pentingnya berpartisipasi bermula dari pemilih pemula yang berusia 17 hingga 21 tahun, karena pada masa tersebut, mereka merasakan bagaimana pengalaman menyuarkan hak pilihnya dan juga menjadi tolak ukur untuk berpartisipasi dalam pemilihan selanjutnya. Apabila mereka tidak mendapat pengarahan dari petugas atau fasilitas yang mereka butuhkan, dapat membuat mereka untuk melakukan golput dalam pemilu selanjutnya.

Berdasarkan berita mengenai kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam ([nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co), 2018) permasalahan yang dialami oleh penyandang tuna rungu adalah tidak dapat memilih karena tidak mendengar namanya saat dipanggil dan kemudian terlewat. Masalah ini harus diperhatikan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam pemilu untuk penyandang disabilitas. Kesulitan lain yang dihadapi para pemilih disabilitas adalah lokasi TPS yang terkadang sulit dijangkau mengakibatkan pemilih yang menggunakan kursi roda mengalami kesulitan mengaksesnya, seperti terletak di bibir kali, jalan sempit dan tidak rata. Persoalan lainnya adalah empati petugas TPS. Dalam hal ini dibutuhkan petugas TPS yang sabar dalam membimbing pemilih disabilitas.



Karena pemilih disabilitas membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan pemilih lainnya.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta merupakan suatu proses rekrutmen politik yang merupakan penyeleksian masyarakat DKI Jakarta terhadap para tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, dimana seluruh masyarakat DKI Jakarta dapat menggunakan hak serta kebebasan yang sama dalam memilih calon yang nantinya dipilih ketika pemilihan berlangsung. Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diselenggarakan berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemilihan Gubernur sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi seharusnya dapat dirasakan dan diikuti oleh semua masyarakat. Adanya diskriminasi terhadap suatu kelompok adalah sebuah cacat demokrasi. Kekurangan dari penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah belum dapatnya memberikan hak secara optimal kepada penyandang disabilitas.(Restuida, 2017: 4).

DKI Jakarta sendiri telah berdiri organisasi penyandang disabilitas yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memberikan kemudahan akses dan kualitas layanan informasi publik terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

Adapun organisasi tersebut adalah Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) yang bertujuan untuk memperjuangkan wujudnya masyarakat inklusif dimana orang tuna rungu dapat berpartisipasi penuh atas dasar kesetaraan haknya di masyarakat.

Pemberdayaan serta peningkatan peran para penyandang disabilitas tuna rungu dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian juga pendayagunaan yang khusus. Walau demikian sebenarnya bukan tidak mungkin mereka para penyandang disabilitas tuna rungu berpartisipasi dalam kegiatan kampanye yang mereka inginkan dan diberikan fasilitas yang baik. Jumlah dari penyandang disabilitas keseluruhan yang berada di DKI Jakarta sendiri dapat dikatakan cukup banyak sehingga tidak boleh diabaikan. Berdasarkan data dari data KPU pada tahun 2017, di DKI Jakarta secara total berjumlah 5.371 pemilih pemula dengan klasifikasi jenis kecacatan yang berbeda-beda. Ketika menghadapi pemilu, penyandang disabilitas akan berhadapan dengan berbagai hambatan juga kendala yang menyulitkan mereka ketika berpartisipasi penuh dan secara efektif dalam lingkungan masyarakat.

Dilansir dalam laman [republika.co.id](http://republika.co.id), dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih disabilitas DKI Jakarta yang telah terdaftar dalam DPT hanya sekitar 5.271 orang.

Dibandingkan dengan data sensus nasional tahun 1995 mengenai jumlah penyandang disabilitas DKI mencapai kisaran 283.000 jiwa. Dengan asumsi pertumbuhan minimal sebesar satu persen, pada 2017 diprediksi sekitar 300.000 masyarakat penyandang disabilitas di DKI Jakarta. Apabila merujuk pada presentase aktif di DKI Jakarta yaitu berada pada kisaran 60 persen dari total penyandang cacat. Dapat diartikan dari total sekitar 300.000 penyandang disabilitas, setidaknya ada sekitar 150.000 dari penyandang disabilitas yang telah atau sudah memiliki hak pilih. Mereka yang terdaftar pada saat pilkada DKI Jakarta hanya di kisaran 5.271 saja.

Tidak tersalurnya penggunaan hak pilih penyandang disabilitas terutama tuna rungu dapat dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh KPU atau ketidak tertarikannya dari individu yang bersangkutan untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dikarenakan adanya hambatan fasilitas yang tersedia dari panitia pelaksanaan pemilu itu sendiri. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa penyandang disabilitas khususnya tuna rungu perlu diberikan perhatian yang khusus dan ditunjukan agar dapat menjamin partisipasi politik penyandang disabilitas tuna rungu di DKI Jakarta.

Pada pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta, baik saat berlangsungnya pemilihan ataupun pada saat kegiatan kampanye dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat dan juga partisipasi

dari para penyandang disabilitas yang memiliki hak sama dengan masyarakat lainnya. Menurut berita dalam website <https://www.cnnindonesia.com/> yang diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 19.00 memaparkan KPU DKI Jakarta meminta peserta pilkada 2017 membuat materi kampanye ramah penyandang disabilitas di media massa. Imbauan tersebut diberikan jelang penyerahan materi kampanye setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada penyelenggara pemilu. Dengan imbauan dari KPU DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas seharusnya tetap bisa mengikuti kampanye.

Pelaksanaan Pilkada di DKI Jakarta terbagi menjadi dua putaran, yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Keputusan tersebut telah dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2017 sebagai hari libur nasional.

Pilkada DKI Jakarta telah berlangsung sebanyak dua putaran. Putaran pertama melibatkan tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur, tiga pasang calon tersebut adalah Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Berdasarkan laman resmi KPU Jakarta, pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta yang telah berlangsung pada tanggal 15 Februari 2017, KPU DKI Jakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 7.294.619 pemilih. Pada pemilu putaran pertama, dari jumlah pemilih. Tercatat warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.794.759 suara. Pada putaran kedua, yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2017, KPU DKI Jakarta menetapkan DPT berjumlah 7.335.473 pemilih. Tercatat warga yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.744.120 suara.

Pada pilkada DKI Jakarta ini, banyak harapan bahwa pilkada secara langsung ini dapat menumbuhkan antusiasme politik rakyat yang diwujudkan dengan tingginya partisipasi politik dari seluruh lapisan masyarakat DKI Jakarta tanpa memandang status sosial mereka. Berdasarkan data yang ada di halaman resmi KPU, hampir semua wilayah DKI Jakarta masih terdapat warga yang tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Fenomena ada warga yang tidak menggunakan haknya untuk memilih atau fenomena lahirnya sikap apatis masyarakat dengan membesarnya pilihan untuk tidak partisipasi (Golongan Putih), Golongan putih (Golput) adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam memberikan suara dalam pemilihan (Prihatmoko, 2003: 152).

Pada saat pilkada tahun 2012, KPU Provinsi DKI Jakarta mendapatkan catatan negatif, baik dari pemilih disabilitas ataupun dari organisasi-organisasi penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya peran dari KPU Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada saat pilkada. Seperti yang ditegaskan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada saat itu, Mochammad Afifuddin (kompas.com, 2013) menyatakan bahwa Indonesia masih belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Pada pilkada DKI Jakarta tahun 2012, fasilitas bagi penyandang disabilitas belum maksimal.

Berdasarkan masalah yang dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut dan melakukan penelitian pada penyandang disabilitas tuna rungu yang berusia 17-21 tahun pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dari organisasi yang bergerak untuk membantu kalangan penyandang disabilitas khusus tuna rungu atau tuli dalam memperjuangkan haknya sebagai warga negara yaitu peneliti memilih Dewan Perwakilan Cabang Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) yang terletak di Jakarta Selatan sebagai tempat meneliti tugas akhir mengenai partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul penelitian: ***“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota***

*DPC GerkatIn Jakarta Selatan Pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017”.*

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu pada pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC GerkatIn Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
- b. Apa faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC GerkatIn Jakarta Pusat pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui bentuk partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC GerkatIn Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam Ilmu Politik khususnya dalam kajian partisipasi politik masyarakat terutama mengenai penyandang disabilitas tuna rungu dalam menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.
- 2) Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai permasalahan penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dalam Pilkada.
- 3) Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis di waktu yang akan datang.

- c. Manfaat Praktis



Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah berupa informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap penyandang disabilitas khususnya tuna rungu juga membantu mereka memperoleh hak dan amanatnya sebagai Warga Negara Indonesia. Selain itu, peneliti berharap agar masyarakat dapat memberikan informasi mengenai pemilihan umum kepada penyandang disabilitas khususnya penyandang tuna rungu dan penyandang disabilitas lainnya, agar dapat turut serta membantu menyosialisasikan partisipasi dalam berpolitik kepada penyandang disabilitas.

## **5. Batasan Istilah**

Dalam penelitian ini terdapat batasan istilah yang digunakan guna memperjelas kata dan maksud yang hendak disampaikan oleh peneliti, yaitu :

### **a. Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan salah satu kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang yang memilih untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiarjo, 2008: 367). Partisipasi Politik yang dimaksudkan oleh peneliti dalam

penelitian ini adalah bentuk berpartisipasi politik dan keikutsertaan seseorang dalam memberikan hak suaranya pada saat kegiatan berpolitik pilkada berlangsung sertayang dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada saat Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.

#### **b. Pemilih Pemula**

Pemilih pemula sendiri terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, dan mereka yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka biasanya adalah pelajar yang telah berusia 17-21 tahun, namun ada juga kalangan muda lainnya yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, yakni para mahasiswa semester awal dan kelompok pemuda lainnya yang pada pemilu periode sebelumnya belum genap berusia 17 tahun (Modul I KPU, Pemilih Untuk Pemula, 2010: 48).Pemilih pemula yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli dan telah menjadi anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan yang telah memiliki haknya serta memenuhi syaratnya untuk memilih pertama kalinya ketika Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah berlangsung pada tahun 2017

#### **c. Penyandang Disabilitas**

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang berarti manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti dari penyandang cacat yang menyiratkan kesan negatif dan terkesan diskriminatif terhadap beberapa pihak. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan oleh peneliti di dalam penelitian adalah mereka pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu yang menjadi anggota dalam organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan dan telah berusia 17-21 tahun atau sudah memenuhi syarat serta memiliki hak untuk memberikan suaranya ketika Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017.

#### **d. Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan kegiatan yang dilakukan di Indonesia untuk memilih pemimpin daerah dan wakilnya secara langsung oleh penduduk daerah dan wakilnya secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat (Arbas, 2012: 31). Pemilihan Kepala Daerah atau

Pilkada yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ketika Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah berlangsung pada tahun 2017.

**e. Organisasi**

Organisasi merupakan suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu (Hasibuan 2011:120). Organisasi yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah organisasi penyandang disabilitas khusus tuna rungu atau tuli anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan yang telah mendapatkan hak pilih untuk pertama kalinya ketika Pilkada DKI Jakarta 2017.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Partisipasi Politik**

##### **a. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dari warga negara adalah salah satu indikator dari wujud demokrasi yang ideal di dalam negara yang berasaskan pada demokrasi. Pada negara-negara yang telah menerapkan sistem politik demokrasi, setiap warga negaranya memiliki hak untuk turut serta menentukan isi dari keputusan politik, karena pada setiap keputusan-keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negaranya.

Menurut pendapat dari McClosky (Budiarjo 2008:367), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik dalam buku Budiarjo (2008:367), sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup

tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

Menurut pendapat dari Huntington dan Nelson (Budiarjo 2008:368) memberi makna yang lebih luas mengenai partisipasi politik dengan memasukan cara eksplisit tindakan illegal dan juga kekerasan. Menurutnya, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut pendapat dari Surbakti (2010:180), Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Selanjutnya, menurut pendapat dari Nie dan Verba (Efriza, 2017:273) partisipasi politik adalah suatu aktivitas masyarakat yang

legal, dan bertujuan untuk memengaruhi pemilihan pejabat-pejabat negara atau langkah-langkah yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, yang dapat memengaruhi alokasi nilai serta otoritatif untuk masyarakat.

Menurut Hardwick (Budiyanto 2007:20) menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu melanjutkan kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut Lane (Sastroatmodjo, 1995: 84) Fungsi dari partisipasi politik ada 4 (empat), yaitu yang pertama adalah sebagai sarana untuk mengejar motif ekonomi, kedua adalah sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan sosial, ketiga adalah sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, dan yang keempat adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologi tertentu.

Berdasarkan pendapat partisipasi politik yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal berpolitik, masing-masing masyarakat atau individu memiliki pola pikir dan sudut pandang yang berbeda

dalam pengamatan politik serta berperannya dalam segala urusan berpolitik.

Berhubungan dengan hal tersebut, menurut pengertian partisipasi politik dari Maran (2007:155), memberikan istilah bentuk partisipasi politik yang dibagi sebagai berikut.

1) Apatisme Politik

Apatisme Politik merupakan sikap seseorang yang tidak memiliki minat atau tidak mempunyai perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala umum atau khusus yang ada pada masyarakatnya. Orang yang bersifat apatis adalah orang yang pasif dan mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ia tidak mampu melaksanakan tanggungjawabnya baik secara pribadi ataupun sebagai warga negara, dan didalam dirinya selalu merasa terancam.

2) Sinisme Politik

Sinisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Orang-orang yang sinis beranggapan bahwa politik merupakan suatu urusan yang kotor, bahwa politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi korban yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dijalankan oleh orang-orang yang tidak tahu malu.

3) Alienasi



Menurut Robert Lane, alienasi adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe seperti ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya menguntungkan para penguasa.

#### 4) Anomi

Anomi adalah perasaan kehilangan nilai dan arahan hidup, sehingga tidak termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Orang-orang yang memiliki perasaan demikian menganggap penguasa bersikap tidak peduli terhadap tujuan-tujuan hidupnya. Seperti halnya alienasi, anomie adalah perasaan keterpisahan dari masyarakat. Alienasi dan anomie politik pada gilirannya bisa mencetuskan kekerasan politik.

Berdasarkan istilah-istilah dalam politik yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak semua orang mau berpartisipasi atau terlibat dalam kehidupan berpolitik. Pada kenyataannya di lapangan, hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi aktif dalam berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Bahkan terdapat pula individu-individu yang menghindari diri dari semua bentuk-bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkat yang paling rendah.

Terdapat juga beberapa faktor pendorong yang membuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu salah satunya, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya datang dari dalam diri individu itu sendiri dan dari orang terdekat di sekitarnya yang bahkan mengetahui tentang kehidupan individu tersebut atau suatu kelompok tertentu, sedangkan faktor eksternal biasanya datang dari suatu kelompok kepentingan ataupun dari tim sukses dari calon kandidat yang menjadi peserta di dalam kegiatan pemilihan umum ataupun ketika pemilihan kepala daerah.

Selain kedua faktor diatas, adapun faktor-faktor lain yang menjadi pendorong timbulnya partisipasi warga negara dalam kehidupannya berpolitik, Milbrath dalam Maran (2007:156), mengemukakan bahwa terdapat empat faktor utama yang mendorong seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, yaitu :

- 1) Adanya Perangsang Politik

Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, minat untuk berpartisipasi dipengaruhi. Misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau media diskusi informal.

- 2) Karakteristik Pribadi Seseorang

Orang-orang yang berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain biasanya mau ikut serta terlibat dalam urusan politik.

### 3) Karakteristik Sosial Seseorang

Karakteristik sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial dapat memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh karena itu, mereka mau berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik.

### 4) Situasi atau Lingkungan Politik itu sendiri

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik.

Berdasarkan pendapat di atas, munculnya gerakan partisipasi dari masyarakat di dalam kehidupan politik juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selain terdapat beberapa faktor pendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam kehidupannya berpolitik,

terdapat pula alasan masyarakat mau menghindari dan menutup diri dari kehidupan berpolitik.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Rosenberg dalam Maran (2007:156), beliau mengemukakan terdapat tiga alasan mengapa suatu individu tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, yaitu :

- 1) Adanya ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktifitas politik. Disini orang yang beranggapan bahwa aktivasi politik merupakan suatu ancaman bagi kehidupannya.
- 2) Adanya anggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan sesuatu yang sia-sia. Disini orang merasa bahwa partisipasi politiknya hanya akan sia-sia dan tidak akan memengaruhi proses politik.
- 3) Tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Maksudnya adalah orang tidak menghargai gagasan politik. Tidak membuahkan hasil yang dapat dipetik dari partisipasi tersebut. Sehingga mereka merasa enggan dan tidak ingin untuk ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan politik.

Perlu kita ketahui, bahwa terdapat beberapa pihak yang melakukan partisipasi politik tidak hanya untuk kalangan dari perseorangan atau hanya dari individu saja. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1994:21), mereka

mengkategorikan mengenai usul-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan berpartisipasi politik yang terdiri atas :

1) Kelas

Merupakan individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.

2) Kelompok

Merupakan individu-individu dengan asal usul ras, bahasa dan/atau etnis yang serupa.

3) Lingkungan

Merupakan individu-individu yang jarak tempat tinggalnya (domisili) berdekatan satu sama lain.

4) Partai

Merupakan individu-individu yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama, yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atau bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan.

5) Golongan

Merupakan individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu dengan yang lainnya dan kemudian membentuk suatu hubungan *patron-client*, artinya satu golongan yang mendapatkan pertukaran-pertukaran manfaat yang secara timbal balik yang berlaku atas

orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi, yang tidak sederajat.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dari itu, peneliti beranggapan bahwa dapat diketahui pihak-pihak yang melakukan partisipasi politik tidak hanya individu atau perseorangan saja. Mereka dapat terbagi menjadi kelas, kelompok, lingkungan, partai politik, bahkan golongan yang cakupannya lebih luas dapat menjadi salah satu pihak yang melakukan kegiatan partisipasi politik.

#### **b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Bentuk dari partisipasi politik masyarakat terlihat dalam aktivitas-aktivitas berpoliticnya. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikutsertaan masyarakatnya dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan turut menduduki jabatan-jabatan baik politik ataupun pemerintahan.

Menurut pendapat dari Surbakti (2010:182), partisipasi politik dipandang dari kategori kegiatan yang dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Mereka yang termasuk di dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak dan memilih pemimpin daerah. Sebaliknya, yang termasuk di dalam kategori pasif adalah menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif adalah suatu kegiatan yang berorientasi pada proses

*input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif adalah kegiatan yang berorientasi pada kegiatan output.

Abramson dan Hardwick (dalam Pawito, 2009: 223) membedakan partisipasi politik ke dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Konvensional	Non-Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan</li> <li>• Kegiatan Kampanye</li> <li>• Pemberian suara (<i>voting</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan petisi</li> <li>• Berdemonstrasi</li> <li>• Konfrontasi</li> <li>• Mogok</li> <li>• Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (perusakan, pemboman, pembakaran)</li> <li>• Perang gerilya dan revolusi</li> </ul>

Tabel 2.1 Bentuk-bentuk partisipasi politik  
Sumber : Pawito (2009:223).

Partisipasi Politik konvensional (Efriza, 2012:290) adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Sedangkan indikator dalam bentuk partisipasi politik konvensional yang dapat menjadi tolak ukur partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum adalah :

a. Membentuk dan Bergabung dalam Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan dan berusaha untuk memengaruhi kebijakan

pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan politik, karena tujuan dari partai politik itu sendiri adalah menduduki jabatan publik. Sedangkan dalam kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu kepentingan dan memengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang dapat menguntungkan pihak masyarakat, terutama masyarakat yang telah bergabung di dalam kelompok kepentingan tersebut.

b. Kegiatan Kampanye

Kampanye pada hakekatnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.

Adapun beberapa Teknik dalam kegiatan kampanye ketika pemilihan berlangsung yaitu dengan cara kampanye yang dapat dilakukan dari satu rumah ke rumah lainnya atau dengan sistem *door to door* oleh tim sukses dari calon peserta pemilu dengan menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Selain itu, terdapat pula teknik lain kampanye, yaitu dengan kampanye massa langsung dengan cara menarik perhatian massa seperti pertunjukan kesenian, pawai dan lain sebagainya. Adapun cara lain yang juga terdapat dalam teknik kampanye massa yang tidak langsung seperti



memberikan pidato melalui televisi, radio dan/atau memasang iklan di berbagai media, baik cetak atau elektronik.

c. Pemberian Suara

Kegiatan partisipasi politik di masyarakat ketika pemilu di negara demokrasi mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili di negara tersebut dan telah mencapai di usia 17 tahun keatas serta telah terdaftar di dalam DPT atau yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya pada saat pemilu berlangsung.

Sedangkan pengertian dari partisipasi non-konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat dalam bentuk kegiatan yang illegal dan menggunakan tindakan kekerasan (Efriza, 2012:290).

Berdasarkan penjelasan dari kedua bentuk partisipasi politik diatas, dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggunakan partisipasi politik dengan bentuk konvensional yang terdiri atas tiga indikator didalamnya, yaitu membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, dan pemberian suara. Peneliti mencoba untuk menggunakan tiga indikator tersebut. Hal tersebut dikarenakan peneliti merasa bahwa ketiga indikator yang telah disebutkan diatas terdapat dalam bentuk partisipasi konvensional yang dirasa paling tepat dalam penelitian ini, karena

nantinya dapat dianalisa untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

**c. Intensitas Partisipasi Politik**

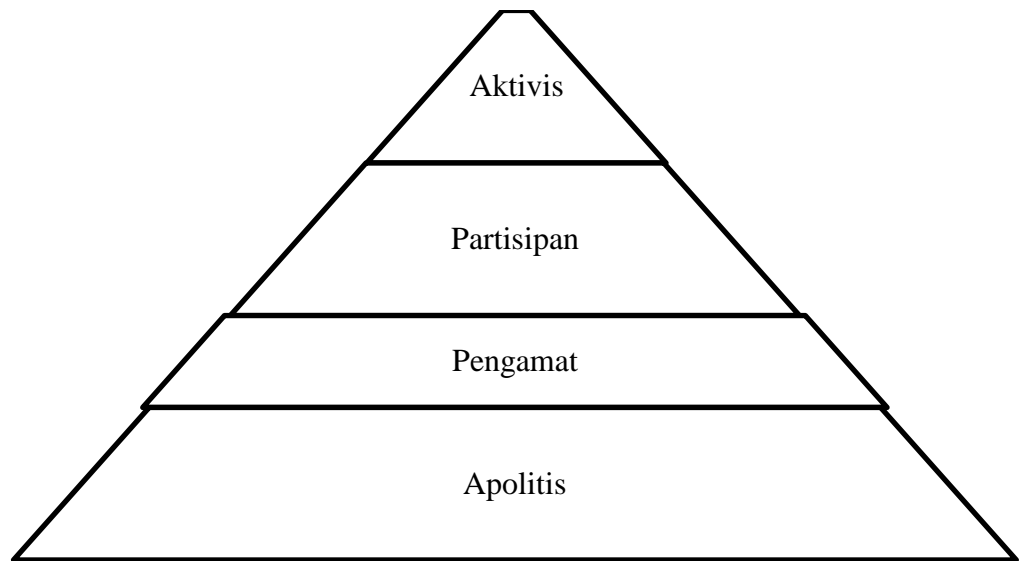
Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik menunjukkan dalam berbagai bentuk dan intensitas. Pada umumnya diadakan pembedaan jenis partisipasi politik berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Rush dan Althof (2005: 142), memberi pendapat bahwa mereka yang benar-benar berpartisipasi dalam bentuk yang paling banyak dalam aktivitas politik merupakan minoritas (seringkali berupa minoritas yang sangat kecil) dari anggota suatu masyarakat.

Menurut pendapat dari Budiardjo (2008: 371), mengemukakan pandangannya mengenai intensitas partisipasi politik pada negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi seperti Indonesia sebagai berikut, orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak begitu banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang mau berpartisipasi secara aktif dan sepenuh waktunya untuk melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai

aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi seorang pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

Hal yang menyamakan dua jenis gejala tersebut dengan piramida yang memiliki dasar yang lebar dan kemudian mengerucut keatas sejalan dengan meningkatnya intensitas politik. Diantara dasar dan puncak terdapat kegiatan yang berbeda intensitasnya. Berbeda menurut intensitas kegiatan ataupun mengenai bobot komitmen individu yang bersangkutan.

Menurut pendapat dari Roth dan Wilson (dalam Suryadi, 2007: 137), menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitas kegiatannya menjadi aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Apabila di jenjangkan, intensitas kegiatan partisipasi politik warganegara tersebut akan membentuk segitiga yang menyerupai piramida yang kemudian dikenal dengan istilah "piramida partisipasi politik". Piramida partisipasi politik dapat diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik warga negara dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan kepala desa.



Bagan 2.1 Piramida Partisipasi Politik  
Sumber : Syarbaini (2002:70).

a) Aktivis

Pada dasarnya, tingkat dari partisipasi politik pada tingkat kategori aktivis adalah seperti para pejabat politik serta para pimpinan suatu partai politik atau kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas tinggi dalam melakukan partisipasi politik. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan *contacting* dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk memengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif.

Terutama bagi pejabat politik, secara politis mereka mempunyai peluang yang cukup kuat dalam memengaruhi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, bahkan secara individual bisa memengaruhi secara langsung. Pada umumnya orang-orang yang terlibat dalam praktik-praktik partisipasi

politik ditingkat kategori aktivis, jumlahnya sangat terbatas, dan hanya diperuntukan bagi sejumlah kecil orang (terutama elite politik) yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh yang diperlihatkan.

Meskipun demikian, kegiatan partisipasi politik pada tingkat kategori aktivis, bukan saja ditempuh dengan cara-cara yang formal dan prosedural atau mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan terdapat warga negara yang berupaya untuk memengaruhi proses politik dengan cara-cara yang non-formal, tidak mengikuti jalur yang ditetapkan secara hukum, bahkan sampai pada tindak kekerasan.

#### b) Partisipan

Pengertian pada tingkat kategori partisipan adalah seperti menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif partai politik, kelompok kepentingan, serta aktif dalam proyek-proyek sosial. Pada tingkat kategori partisipan ditemukan semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang, semakin tinggi intensitasnya dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya, semakin menuju kebawah, maka semakin kecil intensitasnya dan semakin luas cakupannya.

#### c) Pengamat

Partisipasi politik pada tingkat kategori pengamat adalah seperti menghadiri rapat umum, memberikan suara ketika pemilu berlangsung, menjadi anggota partai politik atau suatu kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, dan mengikuti perkembangan politik melalui media massa. Kegiatan tersebut merupakan contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara. Artinya, lingkup jumlah individu yang terlibat didalamnya tinggi, akan tetapi hal tersebut menunjukkan tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, terutama apabila dikaitkan dengan arti pentingnya dalam sistem politik. Praktik-praktik tersebut memiliki tingkat efektifitas yang rendah dalam memengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, selain itu membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.

#### d) Apolitis

Pengertian dari apolitis adalah kelompok warga negara yang sama sekali tidak terlibat dalam melakukan kegiatan politik. Mereka yang termasuk dalam kategori ini cenderung tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan dunia politik.

Berdasarkan piramida partisipasi politik di atas, peneliti sedikit menarik kesimpulan bahwa semakin tinggi derajat dan aktivitas politik seseorang, maka semakin kecil pula kuantitas orang yang terlibat di dalamnya. Pada penelitian ini, piramida partisipasi politik diterapkan dalam menilai dan menganalisa partisipasi politik

warga negara dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Dimana kategori intensitas partisipasi politik dari warga negara dapat ditentukan berdasarkan aktivitas-aktivitas politik mereka pada setiap tahap pelaksanaan dari pemilihan kepala daerah tersebut.

## **2. Pemilih Pemula**

### **a. Pengertian Pemilih Pemula**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam BAB IV Pasal 198 Ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan (Suhartono, 2009: 6).

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama adalah pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai

berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka yang baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang di daftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. (Fenyapwain, 2013: 6).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari pemilih pemula adalah warga negara yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih tetap, dan baru mengikuti pemilu dalam bentuk memberikan suara atau menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali sejak pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun atau sudah/pernah menikah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih; (2) dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; (3) menyebutkan untuk dapat



didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau; b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjadi pemilih menurut Firmanzah (2008: 221) adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin;
- 2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 3) Terdaftar sebagai pemilih;
- 4) Bukan anggota TNI/Polri;
- 5) Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- 6) Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 7) Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Pemilih pemula pada umumnya memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan yang diambilnya belum bulat. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Seringkali apa yang mereka pilih tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketidaktahuan dalam soal politik praktis, terlebih dengan pilihan-

pilihan dalam pemilu atau Pilkada, membuat pemilih pemula seringkali tidak berpikir secara rasional dan lebih memikirkan kepentingan jangka pendek.

Pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada serta faktor-faktor pengaruhnya. Keberadaan pemilih pemula tentu menjanjikan dalam setiap ajang pemilihan umum, sebagai jalan untuk mengamankan posisi strategis yang ingin dicapai oleh setiap kandidat yang maju dalam pemilihan. Siapapun itu yang bisa merebut perhatian kalangan ini kemungkinan besar akan mendapatkan keuntungan, sebaliknya ketiadaan dukungan dari kalangan ini akan terasa cukup merugikan bagi target suara pemilihan yang ingin dicapai.

Pengetahuan mengenai politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih yang lainnya. Perilaku pemilih masih erat kaitannya dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjustifikasi pilihan politiknya jika ditinjau dari studi *voting behaviors*. Hal yang membedakan pemilih pemula dengan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu. (Pratiwi, 2017: 4).

### **3. Penyandang Disabilitas**

#### **a. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Vash (1981: 22) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan disabilitas adalah terdapat kekurangan secara fisiologis, anatomis maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dengan kata handicap, mengacu pada rintangan yang dialami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Wright (1960: 9) pengertian dari disabilitas adalah kondisi yang tidak lengkap, baik secara fisik maupun mental, sementara handicap adalah rintangan-rintangan yang dialami individu saat dia mencoba mengerahkan kemampuan maksimalnya namun terhalang oleh kondisi yang ia alami.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan pengertian dari disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

#### **b. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas**

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas fisik; penyandang disabilitas intelektual; penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik. Selanjutnya, pada ayat (2) dijelaskan bahwa ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 yang menyebutkan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan lain dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak; lalu pada pasal 4 ayat (1) disebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi:

a) Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu dari anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya juga termasuk suatu gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari., yaitu Tuna Netra, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu.

Tuna Netra merupakan individu yang mengalami ketidakfungsian terhadap indera penglihatannya (keduanya) sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan kesehariannya (Soemantri, 2006: 65). Gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut, ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang normal, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.

Berdasarkan uraian diatas, tuna netra dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu buta dan *low vision*. Seseorang dapat dikatakan buta apabila individu sama sekali tidak dapat menerima rangsangan dari luar. Sedangkan seseorang dapat dikatakan *low vision* apabila individu masih dapat menerima rangsangan cahaya dari luar, atau jika individu tersebut hanya mampu membaca *headline* pada surat kabar.

Penyebab dari tuna netra dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor dalam diri individu (internal) atau faktor dari luar individu (eksternal). Hal-hal yang termasuk faktor internal adalah faktor-faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi sejak di dalam kandungan. Kemungkinannya adalah faktor gen (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kurangnya asupan gizi selama kehamilan, keracunan obat, dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal yang termasuk faktor eksternal diantaranya adalah faktor-faktor yang terjadi pada saat atau setelah bayi lahir dilahirkan. Seperti contohnya adalah kecelakaan, terkena penyakit *syphilis* yang mengenai matanya ketika dilahirkan, pengaruh alat bantu medis ketika dilahirkan sehingga terkena sistem syarafnya, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, terjangkit virus *trachoma*, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata yang terjadi karena penyakit, bakteri ataupun virus.

Tuna Daksa merupakan cacat pada bagian anggota gerak tubuh. Tuna daksa dapat disebut sebagai suatu keadaan fisik yang rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir (Soemantri, 2006:121). Pada penyandang tuna daksa

tersebut terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, otot sendi maupun syaraf-syarafnya (Warsiki, 2003:3).

Tuna daksa terdiri dari dua golongan, yakni Tuna Daksa Ortopedi dan Tuna Daksa Syaraf. Tuna daksa ortopedi merupakan kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik merupakan sejak lahir (*congenital*) ataupun yang diperoleh karena terkena penyakit atau kecelakaan, seperti contoh kelainan pertumbuhan anggota badan atau pertumbuhan anggota badan yang tidak sempurna, cacat pada punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lain sebagainya. Sedangkan, Tuna Daksa Syaraf adalah kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang disebabkan oleh gangguan syaraf di bagian otak. Otak merupakan pengontrol tubuh memiliki sejumlah syaraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh, apabila otak mengalami kelainan, sesuatu akan terjadi pada organisme fisik, emosi, dan mental. Salah satu bentuk yang terjadi akibat gangguan pada fungsi otak dapat dilihat pada anak *cerebral palsy*, yaitu adalah gangguan aspek motorik yang dikarenakan disfungsinya otak (Effendi, 2006: 122).

Tuna Rungu adalah mereka yang kehilangan kemampuan untuk mendengar baik sebagian (*hard of hearing*) ataupun seluruhnya (*deaf*) yang menyebabkan pendengarannya tidak memiliki nilai fungsional pada kehidupannya sehari-hari.

Pengertian dari kurang dengar (*low of hearing*) adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, akan tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar walaupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*). Sedangkan pengertian dari tuli (*deaf*) adalah mereka yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak dapat berfungsi lagi dan menggunakan alat bantu dengar.

b) Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah suatu pengertian yang sangat luas dan mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya adalah keterbelakangan mental. Seperti contoh adalah seorang anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Disabilitas intelektual ini dapat muncul kepada seseorang dari usia berapapun.

c) Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan



perkembangan tubuh. Walaupun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, istilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak memiliki komponen intelektual atau mental, seperti contohnya adalah spina bifida.

d) Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya yang dapat terganggu.

e) Disabilitas Mental

Istilah dari disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual yang berada di bawah rata rata. Tidak berdasarkan itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai keadaan emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kegiatan belajar, bekerja, berkomunikasi dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian dari jenis-jenis disabilitas yang diantaranya adalah disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik dan disabilitas

perkembangan, maka di dalam penelitian ini untuk lebih spesifiknya, penyandang yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan fisik tuna rungu dan tuna netra.

### **c. Aksesibilitas Terkait Partisipasi Penyandang Cacat dalam Pilkada**

Berdasarkan dari pengalaman pemilu yang seperti diberitakan dalam surat kabar online detik.com yang di akses pada tanggal 21 Februari 2019, di dalamnya diberitakan bahwa dalam pemilu terdapat sekitar 5.371 orang dari total penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan fisik. Sehubungan dengan jumlah yang terbilang cukup banyak, penyandang disabilitas kurang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya. Hal-hal yang teridentifikasi sebagai yang memerlukan usaha khusus bagi para penyandang cacat tertentu untuk mengakses kegiatan yang terkait dengan pemilihan umum adalah :

#### a) Akses informasi

Akses informasi yang terkait dengan pemilihan umum, seperti para penyandang disabilitas tuna netra, sebaiknya memperoleh akses informasi dalam bentuk huruf *braille*, rekaman audio, format yang berbasis elektronik (untuk diakses dengan komputer), selanjutnya untuk para penyandang disabilitas

tunarungu, memperoleh layanan dalam bentuk penerjemah bahasa isyarat atau media tertulis untuk membantu agar memahami pidato yang terkait dengan pemilihan umum.

b) Akses ketempat pemungutan suara

TPS juga harus di tempat yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, seperti contohnya tidak terletak ditempat yang tidak mengharuskan melewati tangga yang menyulitkan para penyandang difabel, jarak antara bilik suara juga harus cukup luas agar dapat dilalui kursi roda, dan panitia juga harus menyiapkan petugas untuk membimbing ke bilik suara bagi pemilih tuna netra yang akan memberikan suaranya.

c) Akses ke surat suara

Sebaiknya tersedia alat bantu pencoblosan untuk memungkinkan pemilih tunanetra dan tuna daksa agar dapat melakukan pencoblosan sendiri. Selain itu, dengan menyediakan layar yang terhubung dengan laptop dan menampilkan dengan proyektor pada layar yang bertuliskan nama pemilih dan nomor biliksuara yang selanjutnya agar memudahkan tuna rungu melihatnya.

#### **4. Pemilihan Kepala Daerah**

##### **a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan di Indonesia untuk memilih pemimpin

daerah dan wakilnya secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat (Arbas, 2012: 31).

Pilkada adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pengertian dari kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk berada ditatanan wilayah provinsi, bupati, dan wakil bupati untuk ditatanan wilayah kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tatanan di wilayah kota.

Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dilakukan pemilihan langsung. Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak terutama di kalangan para politisi dan elite daerah harus memasang kuda-kuda dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilihan pimpinan daerah.

Berdasarkan dengan uraian yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pilkada adalah sebuah mekanisme politik,

untuk merotasi kepemimpinan di daerah dan untuk mengartikulasikan aspirasi serta kepentingan masyarakat daerah, dengan cara menyelenggarakan Pilkada. Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah beserta wakil secara langsung dan demokratis. Adapun kepala daerah beserta wakilnya untuk memimpin di daerah provinsi, bupati beserta wakilnya untuk memimpin di daerah kabupaten, dan walikota beserta wakilnya untuk memimpin di daerah kota.

Pemilihan kepala daerah juga merupakan proses rekrutmen politik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dimana masyarakat di daerah tersebut secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang akan didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui Pilkada tersebut berasal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk meneliti Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Pilkada yang digelar bertujuan untuk memilih calon gubernur dan wakil gubernur yang akan memimpin DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

#### **a. Asas-Asas Pilkada**

Rumusan terkait dengan asas-asas Pilkada telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum yaitu Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjudil).

Menurut pendapat Prihatmoko (2005:110-111), pengertian dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

a) Langsung

Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

b) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti Pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan apa kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e) Jujur

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggara Pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f) Adil

Dalam penyelenggara Pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta Pilkada mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.

**b. Tujuan dan Fungsi Pemilihan Kepala Daerah**

Menurut pendapat dari Janedjri M. Gaffar (2012 : 85) fungsi dan tujuan dari Pilkada dalam penyelenggaraan pemerintah daerah terbagi menjadi tiga poin utama, yaitu :

- 1) Memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga kepala daerah yang terpilih nantinya, diharapkan dapat memenuhi dan mewujudkan keinginan masyarakat daerah tersebut.

- 2) Melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini diharapkan masyarakat daerah memilih pemimpin dengan berdasarkan visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah. Sebab dengan dilaksanakannya pemilihan tersebut akan menentukan sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Pemilihan kepala daerah menjadi sebuah sarana pertanggungjawaban yang sekaligus menjadi sebuah sarana untuk mengevaluasi dan mengontrol seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya.

Melalui penyelenggaraan Pilkada, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah, dan apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilihan umum, maka dalam pelaksanaan Pilkada harus diselenggarakan secara demokratis sehingga dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Pelanggaran dan kelemahan yang dapat menyesatkan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada harus diperbaiki dan dicegah semaksimal mungkin (Gaffar, 2012: 85).

Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan bertujuan agar masyarakat dapat memilih kepala daerah dengan cara demokratis yang nantinya diharapkan bisa memimpin mereka dan memenuhi hak-hak mereka dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu, tujuan



diselenggarakannya Pilkada adalah guna mewujudkan suatu pemerintahan lokal yang demokratis. Pemerintahan lokal yang demokratis dapat terbentuk apabila pihak pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas berpolitik ditingkat lokal, selain itu pemerintahan yang demokratis dapat terbentuk apabila mengedepankan pelayanan untuk kepentingan publik serta meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan argumentasi yang dipaparkan diatas, menurut pendapat dari Bambang Widjojanto dalam Prihatmoko (2007: 112) paling tidak terdapat tiga hal yang menjadi tujuan utama bagi masyarakat mendesak agar dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah :

- 1) Masyarakat ingin agar kepala daerah yang nantinya mereka pilih nantinya akan lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil dari pemilihan tersebut.
- 2) Rakyat menginginkan agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan menentukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.
- 3) Pemilihan langsung kepala daerah akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para

pemilih, bukan hanya kepada *interest* politik dari kekuatan politiknya saja.

### **c. Pelaksanaan Pemilihan Daerah**

Pelaksanaan Pilkada dilaksanakan oleh KPUD, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 62 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilu juga mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam Pasal 1 Ayat (7) disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi. Selanjutnya pada ayat (8) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota. Berdasarkan pada peraturan dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas bahwasanya praktek dalam kegiatan berpolitik Pilkada provinsi (gubernur dan wakil gubernur) yang notabene-nya dilaksanakan di provinsi merupakan tugas yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi. Sedangkan Pilkada kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 9 menyebutkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat; b. Mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan; c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan; d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; e. Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; dan f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

## **5. Organisasi**

### **a. Pengertian Organisasi**

Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Selain itu, organisasi memiliki karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian yang lain tergantung pada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi

tersebut. Sifat tergantung antara satu bagian dengan bagian yang lain menandakan bahwa organisasi yang dimaksudkan merupakan suatu sistem (Muhammad 2004:23).

Menurut Barnard dalam buku Wursanto (2005:53) mendefinisikan organisasi merupakan suatu sistem usaha bersama antara dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, yang sebagian besarnya mengenai hubungan-hubungan antar kemanusiaan.

Atmosudirjo dalam buku Wursanto (2005:53) menjelaskan mengenai organisasi sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut pengertian organisasi dari Kochler dalam Arni Muhammad (2004:23) mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut pendapat dari Wright dalam Arni Muhammad (2009:24), organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kelompok kerjasama antar orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuannya bersama.

Berdasarkan beberapa pengertian dari organisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi adalah suatu sistem yang mengkoordinasi aktivitas dari bagian-bagian dan memiliki harapan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Dalam penelitian ini, organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan menjadi tempat untuk penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

#### **b. Ciri dan Unsur Organisasi**

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Handayani (1985:43), ciri-ciri dari organisasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- 1) Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal;
- 2) Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (*interdependent part*) yang merupakan kesatuan usaha/kegiatan;
- 3) Setiap anggota memberikan sumbangan usahanya dan/atau tenaganya;
- 4) Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan;
- 5) Adanya suatu tujuan (*the idea of goals*).

Adapun pendapat lain mengenai ciri-ciri organisasi menurut Hardjito (1995:12), yakni :

- 1) Terdapat sekelompok orang;
- 2) Antar hubungan;

- 3) Kerja sama yang didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan;

Unsur-unsur dari organisasi menurut pendapat dari Wursanto (2003:54) adalah sebagai berikut.

- 1) *Man* (orang-orang), dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil;
- 2) Kerja sama, adalah suatu perbuatan saling membantu atau yang dilakukan bersama-sama demi mencapai tujuan serta kepentingan bersama.
- 3) Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai dan juga menggambarkan apa yang seharusnya dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijakan (*policy*), strategi, anggaran (*budget*), dan peraturan-peraturan (*regulation*) yang telah ditetapkan.
- 4) Peralatan (*equipment*), terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin, uang dan barang modal lainnya seperti tanah, gedung/bangunan/kantor.
- 5) Lingkungan (*environment*)
- 6) Kekayaan alam, seperti contoh keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora dan fauna.
- 7) Kerangka atau konstruksi mental organisasi, yakni berupa prinsip dari organisasi.

Sama seperti dalam organ tubuh manusia, dalam struktur organisasi pun terdapat elemen yang perlu dianalisis. Menurut pendapat dari Stoner dan Wengkell dalam buku Siswanto (2005:90) mengemukakan adanya empat elemen yang berguna untuk menganalisis struktur organisasi sebagai berikut.

1) Spesialisasi aktivitas (*Specialization of activities*)

Spesialisasi aktivitas mengacu pada spesialisasi tugas-tugas individual dan kelompok kerja dalam organisasi (dalam pembagian kerja) dan pengaturan-pengaturan tugas-tugas tersebut menjadi satuan-satuan kerja (departementasi). Pada sebuah organisasi pembagian tugas pekerjaan adalah sebuah keharusan yang mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangat besar. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen terkecil dalam organisasi (departementalisasi) merupakan dasar yang digunakan untuk mengelompokkan sejumlah pekerjaan satu kelompok.

2) Standarisasi aktivitas (*Standardization of activities*)

Standarisasi aktivitas merupakan suatu bentuk prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakdugaan (*predictability*) aktivitasnya. Menstandarisasi berarti menjadikan kegiatan pekerjaan seragam dan taat azas.

3) Koordinasi aktivitas (*Coordination of activities*)

Koordinasi aktivitas adalah suatu proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan fungsi-fungsi sub organisasi dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi, untuk menciptakan keserasian gerak langkah unit-unit yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

4) Sentralisasi dan Desentralisasi pengambilan keputusan  
(*Centralization and Decentralization of decision making*)

Sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan mengacu pada lokasi otoritas pengambilan keputusan. Pada struktur organisasi yang di sentralisasi, keutusan diambil pada tingkat tinggi oleh manajer puncak, atau bahkan hanya dilakukan oleh seorang saja. Dalam struktur yang didesentralisasikan, gaya pengambilan keputusan dibagi diantara para bawahan pada hierarki manajemen menengah dan bawah.

**c. Prinsip Organisasi**

Prinsip dari sebuah organisasi seringkali dapat disebutkan sebagai azas-azas organisasi. Prinsip atau azas adalah dasar, pondasi atau suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir. Prinsip organisasi adalah yang menjadi pokok dasar atau yang menjadi pangkal-tolak di dalam menggerakkan organisasi. Maka dari



itu, organisasi dibangun dan digerakkan diatas pondasi yang berupa prinsip organisasi dan pada setiap prinsipnya mengandung kebenaran sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari organisasi tersebut adalah dari kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip organisasi. Adapun prinsip organisasi menurut pendapat dari Wursanto (2003:219), yakni :

1) Memiliki Tujuan yang Jelas

Tujuan adalah adanya sasaran atau target yang ingin dicapai dalam sebuah organisasi. Karena tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi adalah sebuah visi dan misi dari organisasi tersebut, maka setiap tujuannya harus dicapai atau ditempuh dengan cara kerjasama dengan antar sekelompok orang yang mana tujuan tersebut harus dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas.

2) Memiliki Kesatuan Perintah

Pengertian dari memiliki kesatuan perintah adalah bahwa setiap pegawai yang terlibat pada suatu organisasi memiliki atasan langsung. Hal tersebut berarti setiap bawahannya hanya akan mendapatkan perintah atau komando dari satu orang atasan.

3) Keseimbangan

Setiap organisasi selalu membutuhkan keseimbangan. Prinsip dari keseimbangan dalam organisasi dapat dibedakan menjadi

beberapa macam, yakni keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, serta kerugian yang di derita oleh suatu unit harus diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari unit-unit lain.

#### 4) Pendistribusian Pekerjaan

Prinsip dari pendistribusian pekerjaan disebut juga prinsip pembagian tugas. Prinsip sebagian pekerjaan secara homogen (*distribution of work*) adalah mengelompokkan tugas, pekerjaan yang sejenis atau yang erat hubungannya menjadi satu unit tersendiri. Maka dalam pembagian tugas, macam tugas organisasi dibagi menjadi sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan oleh satuan unit tertentu.

#### 5) Rentangan Pengawasan

Rentangan pengawasan merupakan seberapa jauh kemampuan seseorang pemimpin dapat mengawasi para bawahannya secara tepat dan cepat.

#### 6) Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian kekuasaan dari atasan kepada bawahannya atau kepada pejabat lain untuk melakukan suatu pertanggungjawaban. Maka, pelimpahan belum tentu terjadi dari seorang atasan

kepada bawahan, akan tetapi dapat terjadi dari seorang atasan kepada pejabat yang setingkat.

7) Departementalisasi

Prinsip dari departementalisasi dapat dikatakan dengan istilah departementasi. Pengertian dari departementasi adalah proses penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok pekerjaan yang sejenis. Setiap fungsi adalah tugas dan tanggung jawab dari suatu unit tertentu pada organisasi.

8) Penempatan Pegawai yang Tepat

Salah satu prinsip dalam bidang kepegawaian adalah *the right man in the right place*, yang berarti orang yang baik ditempatkan pada tempat yang tepat atau penempatan seseorang harus sesuai dengan keahlian bidangnya.

9) Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu usaha agar mendapat keselarasan gerak, aktivitas, dan tugas antar satuan organisasi. Tujuan dari organisasi akan tercapat secara efektif apabila semua yang terlibat di dalamnya terdapat koordinasi yang baik.

10) Balas Jasa

Balas jasa merupakan suatu bentuk imbalan sebagai ucapan terima kasih yang diberikan dari suatu organisasi yang ditujukan kepada seseorang atas kinerjanya. Dalam

pemberian balas jasa dapat dilakukan dalam beberapa cara, seperti dalam bentuk pembayaran upah atau gaji dan/atau pemberian jaminan sosial.

Sedangkan menurut pendapat dari Syamsi (1994:14), prinsip organisasi adalah sebagai berikut.

1) Perumusan Tujuan dengan Jelas (*formulation of the objectives*)

Setelah memiliki tujuan organisasi, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan dari organisasi tersebut secara rinci dan jelas, termasuk juga jelas batas-batasnya. Perumusan tujuan tersebut dalam prakteknya dijabarkan dalam tugas pokok.

2) Pembagian Tugas Pekerjaan (*division of works*)

Pembagian kerja di dalam suatu organisasi bertujuan untuk membantu dalam meringankan tugas koordinasi yang diharapkan dapat melancarkan pengawasan dan juga menghemat biaya.

3) Pelimpahan Wewenang dan tanggung jawab (*delegation of authority and responsibility*)

Agar dapat menjalankan tugas dengan baik, maka para petinggi dalam suatu organisasi haruslah dilimpahi wewenang. Sebagai konsekuensinya, harus disertai pertanggung jawaban yang sebanding. Wewenang yang

dilimpahkan meliputi dalam pelaksanaan menjalankan tugas, memerintah bawahannya dan menggunakan fasilitas yang dibutuhkan.

4) Tingkatan Hierarki (*level of hierarchy*)

Tingkatan hierarki dalam suatu organisasi yang dimaksud adalah banyaknya tingkatan unit kerja dalam suatu organisasi. Disarankan agar tidak terlalu banyak, karena perintah dari puncak pimpinan yang paling tinggi harus sampai kepada unit kerja yang paling rendah.

5) Rentangan Pengawasan (*span of control*)

Rentangan pengawasan yang dimaksudkan di dalam organisasi adalah pengendalian terhadap sedikit banyaknya bawahan atau anggota yang sekiranya masih dapat diawasi dengan baik.

6) Memahami Tugas dan Kaitan Tugas Keseluruhan (*understanding by the individual of his own task and the task of the whole*)

Setiap unit kerja pada umumnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dan tertentu. Akan tetapi jangan sampai merasa bahwa unit kerjanya saja yang memiliki tugas yang paling penting dibandingkan dengan unit kerja lainnya dan dianggap sebagai pelengkap.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, prinsip-prinsip organisasi yang digunakan sebagai dasar dalam membangun dan menggerakkan organisasi yang kompleks diharapkan dapat berjalan dengan baik. Tercapai atau tidaknya suatu tujuan organisasi tergantung pada kemampuan pimpinan organisasi dalam melaksanakan prinsip dari organisasi tersebut

#### **d. Struktur Organisasi**

Pada umumnya, di dalam setiap perusahaan memiliki struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi adalah salah satu langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan kata lain penyusunan struktur organisasi merupakan langkah terencana dalam suatu perusahaan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Menurut pendapat dari Siswanto (2005:85) struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam yang dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesialisasi aktivitas kerja. Adapun pendapat lain dari Hasibuan (2010:128) struktur organisasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi kedudukan, dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.

Persoalan menyusun organisasi yang sesuai dalam manajemen dapat mendorong pada peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha. Dengan adanya struktur organisasi, maka stabilitas serta kontinuitas organisasi tetap bertahan. Struktur organisasi mengindikasikan alur perintah yang mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggung jawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Struktur organisasi itu sendiri berfungsi sebagai alat untuk membimbing ke arah yang lebih efisiensi dalam penggunaan pekerja dan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam meraih tujuan organisasi.

**e. Komponen Organisasi**

Struktur organisasi diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Bagan organisasi menggambarkan pengaturan posisi kerja suatu organisasi, termasuk bagaimana berbagai posisi tersebut berhubungan satu dengan yang lain melalui garis otoritas dan komunikasi, serta mencerminkan bagaimana organisasi (Laily, 2008:13), misalnya sebagai berikut.

- 1) *The division of work* (posisi dan jabatan menggambarkan tanggungjawab kerja);
- 2) *Supervise relationship* (garis-garis yang mencerminkan siapa melapor kepada siapa);
- 3) *Communications channels* (garis-garis yang mencerminkan saluran komunikasi);

- 4) *Major subunits* (posisi-posisi tertentu yang harus melapor kepada manajer tertentu);
- 5) *Level of managements* (berapa tingkat atau lapis manajemen secara vertikal).

Kegiatan mendesain menurut pengertian dari Robbins (2006:87) struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor dan kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang bersifat formal serta pola interaksi yang akan diikuti. Sebagai bentuk formalisasi (penegasan secara formal) untuk mencapai koordinasi diantara pola-pola interaksi yang terdapat atau terjadi diantara para personel organisasi, terdapat tiga komponen struktur organisasi yang meliputi :

- 1) Kompleksitas

Semakin banyak ragam atau diferensiasi dalam tugas, kedudukan dan kegiatan, akan semakin kompleks organisasinya. Diferensiasi tersebut berwujud jenis spesialisasi, tata pembagian kerja, jumlah peringkat (level/eselon) pada hierarki dan bahkan *branches* di berbagai tempat.

- 2) Formalisasi

Formalisasi adalah banyaknya aturan (*rules*) atau regulasi dan prosedur yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku pegawai. Semakin banyak



peraturan yang dibuat, semakin tinggi pula tingkat formalitasnya.

### 3) Sentralisasi

Berdasar pada lokasi satu pusat pengambilan keputusan. Dibalik itu terdapat pula organisasi yang didesentralisasi, dan bahkan memberikan otonomi kepada unit-unit yang berada jauh dari pusat. Tingkat sentralisasi menentukan tipe dari struktur organisasi. Semakin banyak pelimpahan wewenang akan menghasilkan struktur organisasi yang melebar. Sentralisasi dan desentralisasi merupakan dua bentuk ekstrim sistem pengambilan keputusan organisasional.

#### **f. Restrukturisasi Organisasi**

Restrukturisasi berasal dari kata re- dan struktur, maka struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relative tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi. Menurut pendapat dari Handoko (2006:114), restrukturisasi organisasi atau desain organisasi dapat diartikan sebagai mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola dimana struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian ataupun posisi-posisi maupun orang yang

menunjukkan, tugas wewenang serta tanggung jawab yang berbeda dalam suatu organisasi.

Menurut pendapat dari Gitosudarmo (2001:90), struktur organisasi berkaitan dengan hubungan yang relative tetap diantara berbagai tugas yang ada dalam organisasi dimana proses untuk membentuk struktur tersebut, dan pengambilan keputusan mengenai alternative struktur tersebut dengan nama desain organisasi. Berikutnya, Robbins (2006:77) mengartikan restrukturisasi organisasi sebagai sebuah proses redesain atau penataan ulang terhadap tatanan birokrasi yang telah ada ketika terjadi dinamika tersebut agar dapat berkembang. Adaptasi terhadap dinamika yang terjadi mengakibatkan birokrasi harus tampil sesuai berdasarkan realita yang terjadi. Restrukturisasi merupakan aktivitas untuk menyusun satuan organisasi birokrasi yang akan disertai bidang kerja, tugas atau fungsi tertentu.

Don Hellriegel (2001:474) mendefinisikan desain organisasi adalah sebagai proses dan pemilihan struktur serta sistem formal komunikasi, bidang SDM, koordinasi, kontrol, kewenangan dan tanggung jawab agar tercapainya tujuan organisasi. Secara prinsip, desain organisasi harus mampu mencakup tiga hal, yang pertama adalah menyalurkan informasi dan pembuatan keputusan berdasarkan kepentingan *stakeholders*, yang kedua adalah menentukan kewenangan dan tanggung jawab dalam tugas, bagian

dan departemen, dan yang ketiga adalah menyeimbangkan integrasi antara pekerjaan, tim, departemen dan bagian dengan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Sehingga, hakikat dari desain organisasi mengacu pada pola penyesuaian struktur organisasi (dapat berupa stukturisasi, restrukturisasi ataupun reformasi) agar tujuan dari organisasi dapat tercapai. Desain organisasi nantinya akan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor yang pertama adalah faktor lingkungan, yang mana mencakup lingkungan eksternal dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan organisasi, faktor yang kedua adalah faktor strategi, membuat organisasi mampu menunjukkan kemampuannya yang terbilang unik, organisasi seharusnya mempunyai keunggulan yang kompetitif dalam berbagai hal, dan faktor yang ketiga adalah faktor teknologi, yakni berperan pada waktu pembentukan kelompok, departemen, pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab serta suatu mekanisme yang terpadu.

#### **g. Peran Organisasi dalam Pendidikan Politik**

Pengertian Peran menurut Rivai (2006:148) adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran juga menyebabkan seseorang dapat memahami

perhatian orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku sekelompoknya.

Sedangkan pengertian peran menurut Dewi Wulan Sari, (2009:106) peran merupakan konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Soekanto (2010: 5) menguraikan pengertian mengenai peran menjadi tiga unsur, yaitu peran yang ideal, peran yang seharusnya, serta peran yang sebenarnya. Penjelasan dari unsur-unsur peran tersebut yakni sebagai berikut.

#### 1) Peran yang Ideal (Ideal Role)

Peran ideal dapat diartikan sebagai peran yang diharapkan dan kemudian dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Dikatakan ideal karena peran tersebut telah sesuai dengan status pemegang peranan yang dibentuk untuk menanggulangi masalah tersebut.

#### 2) Peran yang Seharusnya (Expected Role)

Peran yang semestinya adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga berdasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat. Peran ini mengharuskan seseorang atau lembaga menjalankan perannya

karena telah diatur dalam tata peraturan yang berlaku pada lingkungannya.

### 3) Peran yang Sebenarnya Dilakukan (Actual Role)

Peran yang sebenarnya dilakukan adalah peranan oleh seseorang atau sebuah lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Peranan ini merupakan peran ketika telah menjalankan perannya di lapangan

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli terkait peran diatas, dapat disimpulkan bahwa peran suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang atau individu dengan status yang mereka punya sehingga peran tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan.

Peran organisasi pada saat ini dapat dikatakan cukup penting dalam segala aspek di kehidupan manusia, baik itu dalam perusahaan, pemerintah, organisasi sosial, kemasyarakatan dan lainnya. Organisasi juga dapat diartikan bermacam-macam tergantung dari arah mana kita melihatnya. Teori Klasik memandang organisasi itu sendiri sebagai suatu wujud. Sedangkan Teori Sistem memandang organisasi sebagai suatu proses.

Apabila kita memandang dari segi wujud maka, organisasi merupakan kerja sama orang-orang atau sekelompok orang untuk

mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Sehubungan dengan pengertian organisasi tersebut, maka ada beberapa pendapat dari para ahli yang mendefinisikan organisasi sebagai berikut. Menurut pengertian dari Gaus Supardi, (2002:4) mendefinisikan organisasi sebagai tata hubungan antar orang-orang untuk dapat memungkinkan untuk tercapainya sebuah tujuan Bersama dengan adanya pembagian tugas serta tanggung jawab.

Adapun pendapat lain dari Siagian Sofyandi, (2007:3) yang mendefinisikan organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja Bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam suatu ikatan yang mana terdapat seseorang ataupun sekelompok orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Pendapat lainnya menurut Malinowski (2003:2) memberi pendapat bahwa organisasi sebagai suatu kelompok orang yang Bersatu dalam segala tugas dan terikat pada suatu lingkungan tertentu menggunakan alat teknologi serta patuh dan harus taat pada peraturan yang ada secara tertulis.

Menurut Winardi (2004:53) menjelaskan bahwa sebuah organisasi dapat dinyatakan sebagai sebuah struktur sosial yang didesain guna mengkoordinasikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui pembagian kerja dan hierarki

otoritas guna melakukan suatu pencapaian tujuan umum tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui beberapa elemen dasar yang menjadi ciri organisasi, yaitu kumpulan orang, suatu wadah, terstruktur dan tujuan bersama. Berdasarkan dari ciri tersebut, dapat dirumuskan definisi organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan formal dalam rangkaian terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki empat unsur, yaitu sekumpulan orang, suatu wadah, terstruktur dan memiliki suatu tujuan bersama. Dengan demikian, organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuannya bersama, dengan memperdayakan sumberdaya yang dimiliki agar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rangka pemenuhan kebutuhan sosialnya.

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian mengenai Pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa sosialisasi politik dibagi menjadi dua, yaitu Pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik adalah suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses tersebut para anggota masyarakat mengenal serta

mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Surbakti diatas bahwa pendidikan politik menjadi sarana sosialisasi politik kepada warga negaranya. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat secara umum dan kepada pemilih pemula khususnya untuk lebih mengenal dan memahami sistem politik yang ada di Indonesia. Maka dari itu, diharapkan sosialisasi mengenai Pendidikan politik sebagai sarana yang membentuk sikap serta orientasi politik para insan politik. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut pengertian dari Poerwanto (2003:243) Pendidikan politik dapat ditempuh melalui dua cara yakni, secara formal dan non formal. Sedangkan menurut pengertian dari Kansil (2000:197) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat.



Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang bertujuan untuk menyampaikan pemahaman mengenai sistem politik di Indonesia yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu formal dan non formal.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai konsep peran, organisasi dan pendidikan politik diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran organisasi dalam pendidikan politik merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh organisasi agar memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem perpolitikan yang diterapkan di Indonesia.

## **6. Kajian Penelitian yang Relevan**

Adapun beberapa penelitian yang terdahulu telah mengkaji mengenai tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah, sebagai berikut.

- a. Penelitian pertama mengenai penyandang disabilitas yang telah diteliti oleh Nissa Nurul Fathia, dari Universitas Bandar Lampung yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”. Di dalam penelitian tersebut, secara garis besar membahas mengenai pelaksanaan Pilkada di Kota Bandar Lampung. Pada penelitian tersebut, beliau melihat

bahwa ketika pemilu sebelumnya para penyandang disabilitas menjadi kelompok yang minoritas serta kurang diperhatikan keberadaannya. Disamping itu, para penyandang disabilitas dapat dikatakan kurang aktif berpartisipasi ketika pemilu berlangsung. Dapat dikatakan, pada penelitian tersebut terfokus kajian pada permasalahan dan juga minimnya intensitas partisipasi politik dari para penyandang disabilitas dalam bergabung ke dalam suatu tim sukses dan juga mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah di daerah Kota Bandar Lampung.

- b. Penelitian kedua adalah mengenai partisipasi politik disabilitas yang telah diteliti oleh Amalia Stefani, dari universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Peran dan Upaya KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pilkada DKI Jakarta 2017”. Pada penelitian tersebut, secara garis besar membahas mengenai peran dari KPU di Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas. Pada penelitian tersebut, objek dari penelitian adalah KPU Provinsi DKI Jakarta dan meneliti mengenai peranan dari KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan

partisipasi politik pemilih disabilitas dan meliputi upaya apa saja yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan partisipasi politik dari pemilih disabilitas, dan juga apa saja tantangan serta kendala yang dihadapi oleh pihak KPU Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sedangkan hasil dari penelitian tersebut, hal yang dilakukan oleh pihak KPU Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas diantaranya adalah menyediakan alat bantu coblos (*braille template*) bagi penyandang tuna netra, membuat regulasi mengenai TPS akses untuk penyandang disabilitas, mengatur pendampingan untuk para penyandang disabilitas, menyediakan *interpreter* (penerjemah bahasa isyarat) ketika debat kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2017 yang ditayangkan di televisi serta mengadakan rekrutmen relawan demokrasi yang bertujuan untuk membantu KPU DKI Jakarta dalam meningkatkan kesadaran politik para penyandang disabilitas.

- c. Penelitian ketiga adalah mengenai partisipasi politik yang telah diteliti oleh Ilma Nur Amalia, dari Universitas

Negeri Semarang yang berjudul “Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014”. Pada penelitian ini, secara garis besar membahas mengenai tentang partisipasi politik yang berada di daerah pesisir dan terletak di Kabupaten Rembang. Penelitian ini mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat yang berada di pesisir dalam pemilihan presiden tahun 2014 menggunakan teori dari Gabriel A Almond, sehingga pengukuran tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik berdasarkan pada pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Dalam penelitian tersebut, beliau menggunakan metode penelitian Kuantitatif.

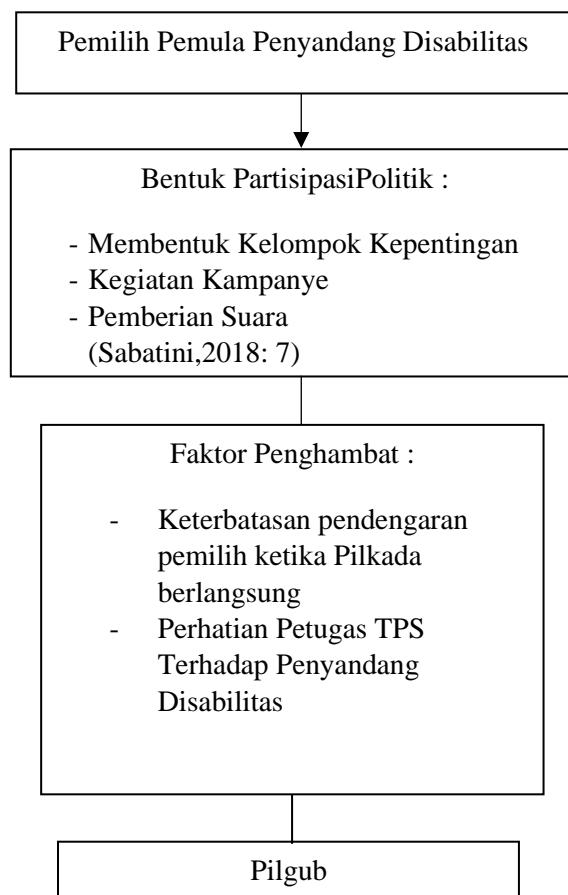
- d. Penelitian keempat adalah penelitian mengenai partisipasi politik yang telah diteliti oleh Wahyu Rahma Dani, dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu tahun 2009”. Pada penelitian ini, secara garis besar menguraikan dan menganalisa bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dan kendala yang dihadapi pemilih

pemula berpartisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bentuk, sejauhmana dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu tahun 2009.

Perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan yang nantinya akan peneliti lakukan di dalam penelitian adalah terletak pada objek yang akan digunakan peneliti dengan objek yang telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, mereka cenderung menggunakan penyandang disabilitas yang terdaftar pada daftar pemilih tetap yang berasal dari segala usia dan berasal dari jenis penyandang disabilitas fisik non tuna rungu, seperti tuna netra, tuna daksa, serta tuna ganda dan tidak harus terikat dengan suatu organisasi tertentu. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan tuna rungu atau tuli yang merupakan pemilih pemula yang berusia 17-21 tahun pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan juga merupakan anggota dari organisasi khusus penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli dalam DPC Gerkatina Jakarta Selatan

## 7. Kerangka Berfikir

Setelah peneliti menjelaskan mengenai landasan teori diatas maka peneliti harus membuat kerangka berfikir agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan terfokus terhadap masalah yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun bagan kerangka berpikir yang akan peneliti gambarkan terkait permasalahan di dalam rumusan masalah sebelumnya dengan bentuk seperti dibawah ini:



Bagan 2.2 Bagan Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan mengenai penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada

Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017”, bahwa dalam mewujudkan keturutsertaan pemilih pemula penyandang disabilitas menjadi faktor yang memengaruhi agar terciptanya pemilu yang berkualitas. Oleh sebab itu, indikator yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur partisipasi dalam pemilu adalah membentuk atau bergabung dalam kelompok dengan kepentingan tertentu, ikut ambil bagian dalam kegiatan kampanye, serta memberikan suara ketika Pemilu berlangsung.

Permasalahan yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 adalah kurangnya perhatian dari petugas TPS terhadap penyandang disabilitas khususnya tuna rungu ketika pemanggilan nama pemilih untuk giliran memilih tidak mendengar dan kemudian terlewat, serta kurangnya pengadaan sosialisasi dari pihak KPU DKI Jakarta mengenai tata cara pemilu untuk pemilih pemula khususnya.

Partisipasi politik dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan mereka dalam pelaksanaan pemilu. Berhubung dengan diadakannya pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017, peneliti mencoba meneliti bagaimana bentuk partisipasi politik serta apa saja yang menjadi faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota dari DPC Gerkatina Jakarta Selatan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Dasar Penelitian**

Pada penelitian ini, metode yang akan peneliti gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengelola dan menggambarkan data dan informasi berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan dan kemudian dianalisa lebih lanjut. Metode penelitian ini tidak hanya sebatas pengumpulan data, tetapi juga meliputi analisis. Penyampaian data juga informasi dijelaskan dalam bentuk tampilan kalimat yang mudah dipahami.

Alasan peneliti ingin menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini nantinya akan lebih mudah di analisis dengan menggunakan penggambaran yang secara mendalam agar kemudian diperoleh kesimpulan yang akan menjawab persoalan mengenai partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada pilkada DKI Jakarta.

Definisi dari metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007: 4) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam mengenai data deskriptif berupa kata-kata tertulis



atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu.

Tujuan dari penelitian deskriptif menurut pendapat dari Nazir (2003: 54), adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Penggunaan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini diperlukan guna menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha agar mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif adalah agar mendeskripsikan bagaimana dan seberapa besar tingkat partisipasi pemilih pemula penyandang disabilitas dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta serta faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota organisasi Gerkatina DPC Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengenai judul skripsi peneliti yang membahas tentang partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, peneliti akan mengambil beberapa informan yang merupakan anggota dari salah satu organisasi yang khusus tuna rungu atau tuli yang bernama Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (GERKATIN) cabang Jakarta Selatan. Gerkatin sendiri merupakan salah satu wadah untuk membantu penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli untuk mendapatkan hak berpartisipasi yang penuh atas dasar kesetaraan haknya sebagai warga negara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa informan dari Gerkatin cabang Jakarta Selatan yang telah berusia 17-21 tahun dan memiliki hak pilihnya saat pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berlangsung.

## **3. Fokus Penelitian**

Fokus terhadap penelitian merupakan hal yang penting dalam melaksanakan penelitian. Fokus penelitian berguna dalam memberikan arah selama proses penelitian dan utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data mana yang relevan dengan tujuan kita. Fokus dalam penelitian ini selalu disempurnakan selama proses penelitian dan memungkinkan dapat berubah. (Basrowi dan Suwandi, 2018: 171).

Fokus-fokus penelitian yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bentuk partisipasi pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan yang turut berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.
- b. Faktor yang menghambat pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan yang turut berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Menurut pendapat dari Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (1989:14) menjelaskan bahwa dalam penelitian ilmiah data didapatkan dari dua jenis, yaitu:

- a. Data Primer

Data Primer adalah yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) secara langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara akan dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan terkait dengan isu/pokok dari masalah dalam penelitian kepada informan. Data tersebut akan diperoleh peneliti dengan pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait dengan partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Data primer dalam penelitian ini berasal dari informasi yang diberikan oleh informan yang terkait dengan penelitian ini adalah :

- 1) Sri Indriani selaku Ketua organisasi DPC Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Jakarta Selatan;
- 2) Nurul Widad Apriani Putri selaku anggota organisasi DPC Gerkatin Jakarta Selatan;
- 3) Muhammad Firdaus Hadi selaku anggota organisasi DPC Gerkatin Jakarta Selatan;
- 4) Taufik Indrianto selaku anggota organisasi DPC Gerkatin Jakarta Selatan.

Penentuan narasumber penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli dari anggota organisasi DPC Gerkatin Jakarta Selatan disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh penulis yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Pengambilan data di organisasi DPC Gerkatin Jakarta Selatan agar peneliti mendapatkan data yang akurat terkait dengan kondisi pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli serta untuk mengetahui bentuk partisipasi politik serta hambatan yang dialami.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan, profil, serta literatur lain yang relevan guna melengkapi data primer penelitian. Data sekunder yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara menggumpulkan berbagai buku-buku atau literatur penunjang, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen maupun arsip yang dimiliki oleh DPC Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN) Jakarta Selatan. Selain itu peneliti juga akan menggumpulkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta seperti jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik atau cara pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

### **a. Wawancara**

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan dari narasumber yang sehubungan dengan rumusan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Sri Indriani selaku Ketua organisasi DPC Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Jakarta Selatan;
- 2) Nurul Widad Apriani Putri selaku anggota organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan;
- 3) Muhammad Firdaus Hadi selaku anggota organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan;
- 4) Taufik Indrianto selaku anggota organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber data yang resmi dan sumber data yang tidak resmi. Sumber data resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau perorangan yang memiliki atas nama suatu lembaga tertentu. Sedangkan sumber data yang tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh suatu individu yang tidak mengatasnamakan pada suatu lembaga tertentu.

Pada penelitian ini, guna melengkapi data primer yang diperoleh melalui wawancara atau *interview*, peneliti akan menggunakan beberapa data pendukung seperti arsip, peraturan dan lain sebagainya yang

dimiliki oleh organisasi penyandang disabilitas tuna rungu yang bernama DPC Gerkatina Jakarta Selatan dan KPU DKI Jakarta.

## **6. Uji Validitas Data**

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan dari data tersebut.

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik menguji data dan informasi dengan mewawancarai informan yang juga mengetahui tentang permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Informasi dari informan tersebut akan dikomplikasikan dengan hasil wawancara yang memiliki kesamaan informasi, teknik triangulasi sumber bertujuan agar memperoleh data dan informasi yang sama dan memiliki validitas yang tinggi.

## **7. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh oleh peneliti akan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data merupakan

sebuah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan ataupun dari studi literatur untuk memperjelas gambaran hasil dari penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran berdasarkan dari temuan-temuan peneliti di lapangan baik dalam bentuk data dan informasi hasil dari wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi:

a. Pengumpulan Data

Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada beberapa informan yang memiliki kapasitas untuk menjadi narasumber dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi agar mendapatkan data yang lengkap dan sesuai dengan penelitian.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam,



menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Reduksi data peneliti dilakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini peneliti memilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan.

c. *Display Data.*

Peneliti akan menampilkan informasi yang telah disusun berdasarkan data yang telah didapatkan secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan ataupun secara parsial. Hasil dari reduksi data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif.

d. *Penarikan Kesimpulan*

Penarikan kesimpulan adalah salah satu bagian kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diujikan kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang berdasar pada data-data tersebut. Proses dalam menganalisa yang akan peneliti lakukan adalah dengan mengacu

pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan dan fokus dalam penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Untuk dapat memberikan gambaran umum mengenai hasil dari penelitian, terlebih dahulu peneliti menguraikan mengenai gambaran secara umum objek penelitian dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah salah satu organisasi penyandang disabilitas khusus tuna rungu atau tuli yang bernama DPC Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Jakarta Selatan yang menyangkut berbagai aspek yang ada didalamnya, seperti sejarah, visi, misi, tujuan, kepengurusan dan keanggotaan, letak lokasi, dan kondisi pemilih pemula dalam organisasi tersebut.

##### **a. Profil Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin)**

###### **1) Sejarah**

Gerkatin atau Gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu Indonesia adalah sebuah organisasi di tingkat nasional yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan penyandang tuna rungu atau tuli yang berada di seluruh Indonesia agar memiliki kesetaraan hak dengan masyarakat pada umumnya.

Sebelumnya, terdapat empat (4) perkumpulan organisasi tuna rungu, yaitu SEKATUBI (Serikat Kaum Tuli Bisu)

didirikan di Bandung tahun 1960, GERKATIN (Gerakan Kaum Tuli Indonesia) didirikan di Jakarta Tahun 1965, PERTRI (Perhimpunan Tuna Rungu Indonesia) didirikan di Yogyakarta tahun 1974-1980, dan PEKATUR (Persatuan Kaum Tuna Rungu) yang didirikan di Surabaya tahun 1978-1980. Kemudian, keempat perkumpulan organisasi tuna rungu tersebut bersepakat untuk mendeklarasikan satu nama dan menyempurnakan nama organisasi tuna rungu menjadi satu nama yakni Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia yang disingkat menjadi Gerkatin.

Organisasi Gerkatin telah berdiri sejak 23 Februari 1981 di Jakarta, dalam organisasi ini hanya beranggotakan teman-teman tuli dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu, teman tuli senior dan kepemudaan atau junior. Teman tuli senior berisikan orang dewasa yang sudah bekerja, berumah tangga, dan yang sudah tidak bersekolah lagi. Sedangkan yang termasuk teman tuli kepemudaan/junior berisi anak-anak muda yang masih berstatus pelajar sampai mahasiswa. Sedangkan untuk DPC Gerkatin Jakarta Selatan, terbentuk baru sekitar 17 tahun yang lalu. Namun, setiap DPC Gerkatin, terutama di DKI Jakarta tidak sama dalam waktu pembentukan organisasinya.

## **2) Visi, Misi dan Tujuan**

Visi dari Gerkatina adalah mencapai kesetaraan kesempatan dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan, menciptakan organisasi tuna rungu yang madani, menjadi organisasi Nasional yang bermitra dengan Pemerintah dan non Pemerintah untuk mewujudkan tercapainya kesetaraan dalam kesempatan, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi tuna rungu dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Misi dari gerkatina adalah :

- A) Memberdayakan tuna rungu agar dapat turut berperan aktif selaku insan pembangunan yang berintegrasi, mandiri dan produktif di era globalisasi;
- B) Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat umum melalui media sosial dan informasi tentang kemampuan tuna rungu menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi;
- C) Melindungi dan melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan pencapaian kesejahteraan tuna rungu;
- D) Menjembatani keterpaduan langkah, potensi tuna rungu dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi dan relevansi dengan kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat;

- E) Meningkatkan peran tuna rungu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- F) Meningkatkan fungsi Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) sebagai bahasa utama diantara para tuna rungu maupun diantara tuna rungu dengan non tuna rungu dalam berkomunikasi.

Tujuan dari Gerkatina adalah :

- A) Menghimpun tuna rungu Warga Negara Indonesia;
- B) Menjalin persatuan dan persatuan komunitas tuna rungu dan non tuna rungu Indonesia;
- C) Menggali dan meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tuna rungu Indonesia;
- D) Membina dan mengembangkan kerjasama dengan organisasi dan komunitas tuna rungu yang menangani tuna rungu baik di dalam maupun di luar negeri;
- E) Berperan aktif membantu melaksanakan usaha-usaha Pemerintah dalam program pengembangan kesejahteraan sosial bagi tuna rungu di Indonesia;
- F) Mengupayakan pemenuhan hak-hak tuna rungu Indonesia;
- G) Memperjuangkan kesamaan kesempatan tuna rungu dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;

H) Untuk mencapainya tujuan Gerkatain dapat membentuk lembaga atau badan usaha demi menunjang kesejahteraan tuna rungu Indonesia.

### **3) Kepengurusan dan Keanggotan**

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerkatin adalah suatu Badan Pelaksana Organisasi Cabang Tertinggi di tingkat Kabupaten/Kota dan berwenang menetapkan serta melaksanakan kebijakan organisasi cabang sesuai dengan AD/ART hasil keputusan dalam Kongres Nasional, Musyawarah Daerah Gerkatain, Musyawarah Cabang Gerkatin dan Peraturan Organisasi Cabang Gerkatin. Seluruh DPP, DPD, dan DPC Gerkatin adalah tuna rungu. Seluruh pengurus Gerkatin dapat dibantu oleh pendamping non tuna rungu sesuai dengan kebutuhan untuk menjadi penengah antara penyandang disabilitas tuna rungu dengan beberapa pihak luar organisasi untuk kepentingan bersama.

Sedangkan untuk jumlah keanggotaan, Gerkatin Indonesia memiliki jumlah anggota yang terbilang cukup banyak. Hingga kini, anggota dari Gerkatin DPC Jakarta Selatan berjumlah 102 anggota, belum termasuk tuna rungu yang masih berstatus pelajar SMP dan non-keanggotaan. Seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ninik selaku ketua DPC Gerkatin Jakarta Selatan :

“Anggota dari Gerkatina Jakarta Selatan sudah ada sekitar 58 orang anggota aktif, itu belum termasuk yang non anggota dan yang masih pelajar, masih banyak tuna rungu yang berada di Jakarta Selatan dan belum bergabung menjadi anggota dari Gerkatina.” (Wawancara Pada Ibu Ninik, Tanggal 10 Januari 2020).

Untuk memudahkan mengkoordinir anggotanya, kepengurusan Gerkatina sendiri dibagi menjadi tiga bagian, yaitu DPP untuk tingkatan nasional, DPD untuk tingkatan provinsi, dan DPC untuk tingkat kabupaten atau kota. Saat ini, yang menjabat sebagai ketua Gerkatina DPP adalah Bapak Bambang Prasetyo, sedangkan ketua Gerkatina DPD DKI Jakarta adalah Ibu Irdanelly DJ. SE, dan untuk ketua DPC Jakarta Selatan adalah Ibu Sri Indriani (Ibu Ninik).

Menurut ibu Ninik, selaku Ketua DPC Gerkatina Jakarta Selatan, saat ini masih banyak penyandang disabilitas tuna rungu yang belum mendaftar di Gerkatina. Hal tersebut dikarenakan berbagai macam alasan. Diantaranya, ada yang sudah pernah menjadi anggota namun tidak aktif kembali dalam beberapa waktu tertentu sehingga ketinggalan info perkembangan organisasi dan kemudian memutuskan tidak ikut bergabung lagi untuk beberapa waktu, adapun yang usianya belum mencapai batas minimal masuk gerkatina, yaitu berusia 17 (tujuh belas) tahun. Adapun syarat lain menjadi anggota Gerkatina adalah warga tuna rungu Indonesia, berpendidikan



minimal SLB/B dan sederajat atau tidak berpendidikan yang berkaitan dengan tuna rungu, pendaftaran dan pendataan tuna rungu dilakukan oleh DPC Gerkatin, setiap anggota diberikan kartu anggota oleh DPC Gerkatin dan disahkan oleh Ketua DPD Gerkatin.



Gambar 4.1 Kartu Anggota DPC Gerkatin Tampak Depan dan Belakang  
 Sumber : Dokumentasi di Lapangan

Dalam penelitian ini, struktur organisasi yang dipakai peneliti adalah struktur organisasi DPC Gerkatin Jakarta Selatan pada periode tahun 2017-2021. Kepengurusan dari organisasi Gerkatin berlaku selama 4 tahun dan kemudian akan diatur kembali setelah diadakannya Musyawarah Besar (Mubes) untuk selanjutnya memilih ketua DPC yang baru.

Ketua akan memilih nama-nama anggota yang memiliki kemampuan dan ketersediaannya menjadi pengganti ketua sebelumnya untuk menjadi kandidat selanjutnya. Masa kepengurusan dari ketua serta anggota kepengurusan lain yang menjabat di DPC Gerkatin Jakarta Selatan akan berakhir pada bulan April tahun 2021.

Struktur Organisasi Gerkatin Jakarta Selatan dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang. Kemudian, pengurus inti terdiri dari Ketua yang dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Gerkatin juga memiliki beberapa Seksi-Seksi Bidang yang bertugas untuk membantu kepengurusan inti. Seksi-seksi bidang tersebut dipimpin oleh Ketua Tim, yaitu terdiri dari Seksi Pendidikan, Seksi Ketenagakerjaan, Seksi Kepemudaan, Seksi Olahraga, Seksi Hubungan Masyarakat (Humas), Seksi Pemberdayaan Perempuan, Seksi Informatika dan Komunikasi.

#### **4) Lokasi**

Gerkatin merupakan salah satu komunitas yang dibuat secara khusus untuk penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli yang berada dan telah tersebar di seluruh Indonesia. Secara administratif, organisasi Gerkatin Indonesia telah memiliki kantor sekretariat Pusat yang ada di Jakarta dan terletak di Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kantor Sekretariat dari DPC

GerkatIn Jakarta Selatan sendiri, terletak di alamat Jalan Tanjung 9 No. 6 RT 012/RW 002, Perumahan Rancho Indah, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12530.



Gambar 4.2 Alamat DPC GerkatIn Jakarta Selatan  
Sumber : Dokumentasi di Lapangan



Gambar 4.3 Kondisi Kantor Sekretariat DPC GerkatIn  
Jakarta Selatan  
Sumber : Dokumentasi di Lapangan

## 5) Kondisi Pemilih Pemula di GerkatIn

Pada Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, ada sekitar 10 orang anggota GerkatIn yang telah mendapatkan hak suaranya ketika Pilkada berlangsung. Sekitar sebanyak 6 orang anggota telah memberikan serta menggunakan hak suara dan hak pilihnya ketika Pilkada berlangsung, dan sebanyak 4 orang

anggota lainnya tidak mau menjawab apakah mereka telah memberikan hak suara dan menggunakan hak pilihnya ketika Pilkada berlangsung atau tidak.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017**

Partisipasi politik adalah sebuah bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok di dalam negara demokrasi. Hal ini juga dilakukan oleh pemilih pemula disabilitas tuna rungu atau tuli anggota organisasi DPC Gerkatin Jakarta Selatan dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 pada putaran kesatu dan kedua, terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan, seperti mengikuti kegiatan kampanye, melakukan diskusi politik, komunikasi politik dan menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan bentuk partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Peran dari DPC Gerkatin terhadap pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu adalah sebagai wadah untuk perantara apabila terdapat info terbaru mengenai Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Seperti info terkait dengan kampanye yang khusus penyandang disabilitas, info pengadaan sosialisasi dari pihak penyelenggara pemilu atau KPU. DPC

Gerkatin sendiri membantu melakukan kampanye agar tidak melakukan golput ketika pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Bentuk partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 untuk lebih rincinya maka akan dijelaskan sebagai berikut.

**a. Kampanye**

Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan dalam bentuk kampanye politik, mereka cenderung mengetahui bahwa ada kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur dan wakil pada saat itu, mereka mengetahui adanya kampanye melalui grup *WhatsApp* DPC Gerkatin Jakarta Selatan, televisi dan juga dari teman-temannya. Namun, hanya sedikit peminat dari kalangan pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli, karena mereka tidak tertarik untuk mengikuti kegiatan kampanye karena seperti yang mereka ketahui, bahwa beberapa gubernur sebelumnya banyak yang tidak amanah dan cenderung melupakan jasa dari mereka rakyat kecil ketika pemilihan berlangsung. Seperti yang dinyatakan oleh Hadi (19 tahun) dalam wawancara berikut.

“Saya tidak ikut kampanye, tapi saya tau dari teman-teman juga kalau ada kampanye di Rumah salah satu

calon pada waktu itu, tapi saya memilih tidak hadir, karena percuma saja kalau ikut kampanye, sebelum terpilih bisa deket sama kami (disabilitas) nanti setelah terpilih biasanya lupa. Tapi mungkin teman-teman lain ada yang ikut, tapi saya belum tertarik untuk ikut kampanye, belum ada keinginan untuk kampanye kampanye seperti itu.” (Wawancara pada Hadi Tanggal 10 Januari 2020).

Hal tersebut juga disampaikan oleh anggota Gerkatina lainnya, Rian (20 tahun), dalam wawancara pada tanggal 10 Januari 2020, yang menyatakan “Saya tau ada kampanye, tapi belum paham buat apa kampanye, tapi mungkin ada pengaruh dalam memilih, setelah paham maksud dari calon gubernur tersebut dalam kampanye nya”.

Adapun anggota Gerkatina lain yang mengikuti kegiatan kampanye, tapi belum yakin apakah mengikuti kampanye merupakan salah satu hal penting atau tidak, namun, mampu memengaruhi pilihan politiknya. Menurut pendapat dari Menik (22 Tahun) dalam wawancara :

“Ya saya pernah ikut kampanye pada salah satu calon, tapi Cuma sekedar ikut-ikutan teman-teman tuna rungu saja. Saya tau info ada kampanye karena saya masuk organisasi Gerkatina, nah saya tau info kampanye dari situ, dari grup *WhatsApp* yang dikirim anggota lainnya, disana juga ada juru kampanye yang berasal dari non-difabel yang bisa bahasa isyarat, jadi saya sedikit paham, saya pribadi setelah mengikuti kegiatan kampanye yang khusus untuk disabilitas kemaren, cukup memengaruhi pilihan politik saya, kalo ditanya penting atau tidak itu kampanye saya tidak tau, saya ikut-ikutan teman-teman doang” (Wawancara pada Menik, Tanggal 10 Januari 2020).

Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Jakarta Selatan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dalam bentuk Kampanye menunjukkan bahwa mereka merasa tidak atau belum terlalu penting dan tidak berpengaruh besar untuk merubah pandangan mereka pada salah satu pasangan calon ketika pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Hal tersebut dikarenakan beberapa dari mereka masih belum paham secara mendalam akan apa yang dilakukan selama kegiatan kampanye dan apa tujuan diadakannya kampanye. Hal ini terlihat dari pernyataan Rian “saya tau ada kampanye, tapi belum paham buat apa kampanye, tapi mungkin ada pengaruh dalam memilih, setelah paham maksud dari calon gubernur tersebut dalam kampanyenya”. Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye calon gubernur pada saat itu, mereka mengatakan bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun atau dapat dikatakan dilakukan dengan secara sukarela apabila ingin mengikuti atau tidak kegiatan kampanye tersebut.

Namun, berdasarkan dari pernyataan salah satu narasumber diatas menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan kampanye untuk menarik atensi kalangan penyandang disabilitas, dari pihak pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 terhadap pemilih pemula penyandang disabilitas

tuna rungu atau tuli dapat dikatakan sudah cukup ramah untuk penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli. Hal tersebut dapat terlihat dengan disediakannya penerjemah atau interpreter dari pihak panitia pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terutama untuk kalangan penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli agar mereka paham apa saja yang hendak yang disampaikan oleh pasangan calon gubernur dan wakil pada saat kampanye berlangsung.

Pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli anggota organisasi Gerkatina Jakarta Selatan mengetahui informasi bahwa akan dilaksanakannya kampanye pada putaran pertama dan kedua yang dilakukan oleh para calon dan wakil gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 melalui grup *WhatsApp* Organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan yang bernama Gerkatina Jakarta Selatan. Dalam grup *WhatsApp* tersebut terdiri dari anggota grup yang berdomisili di wilayah Jakarta Selatan dan mencakup dari usia yang minimal 17 tahun dan segala jenis pekerjaan atau jabatan.





Gambar 4.4 Grup *whatsapp* DPC Gerkatina Jakarta Selatan  
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Selain itu, info mengenai kampanye tidak hanya dibagikan atau *dishare* oleh Ketua atau Humas dari DPC Gerkatina sendiri. Siapa saja yang memiliki info terbaru mengenai Kampanye dan lainnya dapat disebarluaskan melalui grup *WhatsApp* tersebut dengan catatan info yang disebarluaskan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau bukan info *hoax*. Mereka juga saling memberi info terbaru mengenai kebijakan dari calon Gubernur beserta wakil mengenai apa saja kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan di Jakarta apabila mereka nantinya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Peran organisasi yang dilakukan oleh Gerkatina dalam hal kampanye adalah menjadi wadah yang bertujuan membantu mengkoordinasikan para anggota pasangan calon dan wakil Gubernur Pilkada DKI Jakarta untuk nantinya disampaikan kepada anggota Gerkatina Jakarta Selatan dalam hal kampanye.



Gambar 4.5 Kegiatan Kampanye Salah Satu Calon Gubernur  
Sumber : Dokumentasi Ketua DPC Gerkatina Jakarta Selatan

#### **b. Diskusi Politik**

Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan dalam bentuk diskusi politik, hanya sebatas dalam diskusi informal yang mana mereka melakukan kegiatan diskusi politik hanya dengan sesama teman tuna rungu ketika berkumpul bersama, diskusi politik di kalangan penyandang disabilitas tuna rungu khususnya anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan terjadi apabila salah satu teman mereka baik dari teman satu organisasi

Gerkin atau teman yang normal mereka membuka obrolan mengenai Pilkada. Dalam diskusi politik yang bersifat informal tersebut mereka biasanya hanya sebatas membahas mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan perkembangan Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Menik dalam wawancara :

“Saya pribadi kurang banyak tanya, Cuma kalau temen-temen begitu banyak sih yang bahas mengenai Pilkada, saya cukup tau, kalo sama keluarga jarang, sebab pilih beda. Saya biasanya cuma temen-temen aja, kita melakukan perbandingan dan juga kedepannya kita juga ingin mampu untuk disetarakan bahwa disabilitas bisa seperti orang lain, cuma yang membedakan ya kita punya kekurangan aja dan mungkin ada keterbatasan, makanya hal tersebut sering dibahas, mudah-mudahan pemerintah atau dinas lain dapat memperhatikan disabilitas lebih baik” (Wawancara pada Menik Tanggal 10 Januari 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan mereka cukup tertarik ketika berdiskusi untuk membahas pemenuhan hak-hak disabilitas, terutama tuna rungu dan memiliki harapan yang besar untuk pemerintah agar lebih memperhatikan mereka, karena permasalahan yang ada di DKI Jakarta tidak hanya kemiskinan, banjir atau kemacetan saja. Masih banyak yang perlu diperhatikan dari kalangan disabilitas. Seperti penyediaan kuota lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas baik di instansi pemerintahan ataupun instansi

swasta dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ketika di transportasi umum.

Diskusi politik juga dilakukan dengan teman sesama penyandang disabilitas tuna rungu, hal tersebut berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh Hadi dalam wawancara :

“Iya kadang-kadang, sama teman-teman, misal sedang kumpul-kumpul, ngomong-ngomong tentang Pilkada, ya cuma ngobrol sekedar bagaimana cara memilih, tapi bukan bahas yang lebih dalam, soalnya nanti takut berantem kalo beda pandangan” (Wawancara pada Hadi Tanggal 10 Januari 2020).

Pernyataan tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Rian dalam wawancara :

“Biasanya sih ya, saya itu ikut diskusi sekedar ya bahas tentang kebutuhan disabilitas, seperti jalanan untuk tuna netra, terus rambu tertulis untuk tuna rungu. Jujur saya sendiri gak banyak mengikuti perkembangan politik, kalau ada momen seperti pemilihan saya tertarik.” (Wawancara pada Rian Tanggal 10 Januari 2020).

Diskusi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan juga dapat dikatakan cukup antusias atau cukup sering melakukan diskusi politik ketika menjelang diadakannya Pilkada Gubernur DKI Jakarta dalam diskusi politik ini juga mereka cenderung lebih membahas mengenai perkembangan dari hak-hak disabilitas. Mereka melakukan diskusi politik dengan teman normal juga dilakukan secara non-formal dan

tidak ada mengikuti suatu forum khusus yang membahas secara rinci mengenai program kerja dari pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

Organisasi Gerkatin Jakarta Selatan menjadi salah satu wadah bagi pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli untuk melakukan diskusi politik dengan sesama anggotanya. Dari segala umur anggota di dalamnya, ketika proses berlangsungnya diskusi, peran dari organisasi Gerkatin dalam diskusi politik, dapat dikatakan menjadi salah satu pengaruh yang cukup besar bagi anggotanya yang tergolong sebagai pemilih pemula. Dengan dilakukannya diskusi politik, mereka lebih bisa bertukar pikiran dengan sesama penyandang disabilitas tuna rungu yang telah memiliki pengalaman dalam menghadapi pemilihan umum sebelumnya. Maka, dalam berdiskusi politik yang dilakukan menjadi salah satu kesempatan bagi mereka untuk menanyakan mengenai pemahaman tentang calon gubernur beserta wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

**c. Komunikasi Politik**

Komunikasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan adalah seberapa paham mereka mengenai visi dan misi dari pasangan calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Kenyataannya dilapangan, masih banyak penyandang disabilitas yang kurang paham akan visi dan misi dari para pasangan calon gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Seperti yang dinyatakan oleh Menik dalam wawancara :

“Waktu dulu tapi, saya tau apa isi visi misi mereka, saya tau dari TV, atau cari internet, tapi sekarang sudah lupa. Udah lama soalnya. Tapi seingat saya sedikit-sedikit paham. Tapi ada juga yang belum paham betul-betul” (Wawancara pada Menik Tanggal 10 Januari 2020).

Pernyataan diatas diperkuat dari hasil wawancara dengan Rian ketika wawancara pada tanggal 10 Januari 2020 “Saya sih kurang paham, tapi saya tau visi dan misinya pada saat itu ya ada beberapa paham ada yang tidak paham.”

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Hadi ketika wawancara berlangsung pada tanggal 10 Januari 2020 “Iya saya tau sedikit-sedikit, saya fokus sama yang mengangkat hak-hak disabilitas, saya paham sedikit tapi masih rasanya kurang paham”.

Peran organisasi Gerkatina Jakarta selatan dalam hal komunikasi politik adalah bertugas untuk meneruskan informasi mengenai hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam memilih, pembahasan hak-hak apa saja yang dapat diperjuangkan oleh mereka dan lain-lain. Namun, berdasarkan dari hasil pernyataan di atas menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu

anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan dalam bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli terbilang masih ada yang kurang memahami tentang informasi visi dan misi dari pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada saat itu, hal tersebut dikarenakan kurangnya penjelasan lebih rinci dari *website* atau media televisi.

#### **d. Pemberian Suara**

Pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatin Jakarta Selatan dalam pemilihan Gubernur tahun 2017 mengaku bahwa mereka telah menggunakan hak pilihnya karena tidak ingin menjadi golput dan telah sadar bahwa mereka telah memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan serta menggunakan hak pilihnya karena hal tersebut adalah penting dan wajib bagi Warga Negara Indonesia. Mereka melakukan pemberian suara tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan memilih sesuai dengan pasangan mana yang mereka yakini dapat membawa perubahan kedepannya. Seperti yang dinyatakan oleh Menik pada saat ditanya apakah kemarin ketika pilkada gubernur DKI Jakarta tahun 2017 menggunakan hak pilihnya dalam wawancara berikut :

“Iya saya pakai hak suara saya, karena saya ingin ikut berpartisipasi minimal dalam pemberian suara, supaya tidak golput.” (Wawancara pada Menik Tanggal 10 Januari 2020).

Hal serupa juga disampaikan oleh Rian dalam wawancara dan memberi pernyataan :

“Iya pasti saya ikut coblos, soalnya sayang, ini kesempatan kita untuk memberikan suatu perubahan, terutama untuk DKI Jakarta sendiri. Semoga nanti amanah sesuai dengan apa yang dijanjikan dulu” (Wawancara pada Rian Tanggal 10 Januari 2020).

Pernyataan dari narasumber Hadi juga mengatakan hal yang sama dalam hasil wawancaranya :

“Ya, ya saya pakai hak suara saya, karena teman-teman bilang jangan sampai golput. Cuma butuh 5 menit untuk 5 tahun kedepan” (Wawancara pada Hadi Tanggal 10 Januari 2020).

Berdasarkan pernyataan diatas, mereka menganggap bahwa dengan menggunakan hak pilih adalah salah satu kewajiban, akan tetapi menggunakan hak pilih menjadi salah satu tanda bahwa walaupun mereka memiliki kekurangan secara fisik, akan tetapi tidak menghalangi untuk turut serta berpartisipasi dalam pemberian suara.

Dalam menjelang Pilkada Gubernur DKI Jakarta, beberapa dari narasumber mengaku telah mendapat arahan dari orang tua mereka masing-masing agar memberikan hak suaranya untuk salah satu pasangan calon tertentu. Walaupun demikian, mereka lebih memilih apa yang mengikuti hati nurani mereka walaupun diarahkan oleh orang tua mereka. Seperti yang diutarakan oleh Menik dalam wawancaranya:



“Iya iya, ada orang tua suruh pilih salah satu calon, tapi saya cuman bilang iya nanti saya pilih, tapi di TPS saya memilih apa yang saya mau pilih” (Wawancara pada Menik Tanggal 10 Januari 2020).

Sama halnya dengan Rian, beliau pun juga merasakan hal yang sama dengan temannya, dalam wawancaranya beliau mengatakan :

“Iya betul, ibu dan bapak saya sangat suka sama salah satu calon dari salah satu partai, saya secara tidak langsung disuruh untuk memilih pasangan calon tersebut, tapi saya diam saja. Tidak bilang iya dan tidak” (Wawancara pada Rian Tanggal 10 Januari 2020).

Akan tetapi, pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Hadi pada saat ditanya apakah ada dari salah satu pihak keluarga yang mengarahkan kepada anda untuk memilih salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada saat Pilkada tahun 2017 berlangsung, Hadi mengungkapkan hal ini dalam wawancaranya :

“Kalau keluarga saya sih jarang bahas gitu, tapi kalau untuk mengarahkan pilih salah satu calon gak ada, keluarga saya bilang terserah kamu mau pilih siapa aja, kalau dari keluarga sih palingan cuman ngasih tau, nanti coblos caranya gini, cuman gitu aja sih gak ada suruh pilih 1 atau 2 atau 3” (Wawancara pada Hadi Tanggal 10 Januari 2020).

Peran dari Organisasi Gerkatina adalah mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka golput ketika Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 berlangsung, terutama dari kalangan pemilih pemula dalam anggotanya. Mereka juga

mendukung pemilihan yang LUBERJUDIL dan menerapkan memilih sesuai apa yang kita percaya dan yakini benar serta amanah dalam menjalankan tugasnya ketika terpilih nanti.

Berdasarkan dari beberapa pernyataan diatas, mereka cenderung mengalami arahan secara langsung atau tidak langsung dari pihak keluarga, terutama dari orang tua. Namun, dalam kenyataannya dilapangan, mereka lebih memilih dan mengikuti berdasarkan hati mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam mencoblos pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

## **2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017**

### **a. Kurangnya Sosialisasi**

Kurangnya sosialisasi dari pihak KPU menjadi salah satu faktor penghambat yang menjadi persoalan cukup serius dalam pemilihan gubernur kali ini., seperti pernyataan yang dinyatakan oleh Hadi dalam pertanyaan apakah ada sosialisasi dari pihak KPU “Sosialisasi gak ada, tapi mungkin bisa jadi ada tapi saya tidak tau. Kayaknya teman-teman juga tidak ada info, saya tau cara memilih diajarin sama bapak”.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Menik dalam wawancaranya :

“Oo tidak ada, saya tidak pernah ada tau sosialisasi dari KPU, tapi kalau cara coblos waktu itu ada relawan datang ke

kami, kemudian dia ngasih tau cara coblos. Saya bingung gimana nanti, saya tanya kepada sodara atau keluarga saya” (Wawancara pada Menik Tanggal 10 Januari 2020).

Pernyataan dari ketua Gerkatin, ibu Ninik juga mengatakan hal demikian dalam wawancaranya, beliau menyatakan :

“Sekarang kalau dari KPU gak ada, dulu pernah satu kali, waktu zaman Fauzi Bowo, dia berasal dari pihak KPU tapi gak bisa bahasa isyarat, jadi kami gak paham apa maksudnya. Dulu belum ada banyak interpreter seperti sekarang ini” (Wawancara pada Ibu Ninik Tanggal 10 Januari 2020).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak KPU DKI Jakarta ketika menjelang Pilkada berlangsung, membuat beberapa pemilih pemula penyandang disabilitas mengalami kebingungan bagaimana caranya mencoblos. Dari seluruh narasumber yang diwawancarai, tidak ada satu pun yang menerima atau tau mengenai sosialisasi dari pihak KPU DKI Jakarta pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mengenai bagaimana tata cara memilih yang benar ketika Pilkada berlangsung dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan mengingat mereka memiliki kekurangan secara fisik. Mereka justru mengetahui cara memilih melalui pihak keluarga.

Pihak humas dari DPC Gerkatin Jakarta Selatan sendiri telah mendapat undangan dari KPU DKI Jakarta dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya, baik itu Pemilihan Presiden, anggota Legislatif ataupun Pilkada DKI Jakarta sebelumnya, akan tetapi setiap dalam pelaksanaannya tidak ada tenaga penerjemah atau interpreter yang membantu menerjemahkan apa yang dijelaskan oleh pembicara ke

dalam bahasa isyarat agar anggota dari Gerkatina mengerti dan paham sosialisasi yang hendak disampaikan dari pihak KPU kepada mereka. Tidak adanya tenaga penerjemah bahasa isyarat atau interpreter ketika sosialisasi dari pihak KPU DKI Jakarta menjadi sebuah catatan untuk kedepannya agar sosialisasi pemilu atau pilkada kepada penyandang disabilitas tuna rungu atau tuliberikutnya agar disediakan tenaga penerjemah atau interpreter supaya memudahkan penyandang disabilitas tuna rungu dapat memahami sosialisasi politik tersebut dengan baik.

#### **b. Tidak Ada Pendampingan**

Tidak ada pendampingan khusus untuk penyandang disabilitas dari pihak Panitia TPS atau keluarga menjadi salah satu kesulitan yang mereka alami ketika pemilihan berlangsung. Seperti yang dinyatakan oleh Menik pada saat wawancara tanggal 10 Januari 2020 yang menyatakan “tidak ada pendampingan, yang ada pendampingan cuman tuna netra sama tuna daksa doang, tuli gak ada, gitu, padahal kita juga gak paham gimana cara (memilih)”.

Hal serupa juga dialami oleh Rian, pada wawancara oleh peneliti, beliau menyatakan :

“Salah satu hambatan yang saya rasakan adalah tidak ada bantuan bagaimana cara mencoblos, seharusnya bisa lebih membantu tuli. Bukan cuman yang menggunakan kursi roda saja, saya sedikit bingung bagaimana caranya, dimana saya harus memilihnya” (Wawancara pada Rian Tanggal 10 Januari 2020).

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak tersedianya pendampingan dari pihak keluarga atau petugas TPS ketika

memilih menjadi salah satu faktor yang menghambat penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli ketika mereka hendak memilih. Sehingga yang terjadi di lapangan pada saat itu, Masih ada beberapa pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli yang bingung bagaimana cara yang benar dalam memberikan hak suaranya serta hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika mencoblos.

### **c. Sarana yang Kurang Ramah Disabilitas**

Tidak banyak orang yang memerhatikan keberadaan penyandang disabilitas khususnya tuna rungu atau tuli, seperti contohnya adalah pada saat Pilkada berlangsung. Ketika pemilihan berlangsung, petugas TPS tidak mengetahui bahwa terdapat penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas tuna rungu atau tuli yang pada saat itu hadir atau datang ke TPS karena tidak adanya keterangan jenis disabilitas di dalam kertas DPT atau surat undangan. Hasilnya adalah ketika giliran nama mereka dipanggil untuk menuju bilik suara, petugas TPS tidak memberikan isyarat kepada mereka dan pemanggilan nama hanya dilakukan melalui pengeras suara saja, sehingga mereka penyandang disabilitas tuna rungu tidak mengetahui bahwa namanya telah dipanggil untuk menuju bilik suara atau sudah terlewat. Seperti yang dinyatakan oleh Menik dalam wawancara :

“Petugas tidak tau kalo saya tuna rungu, tidak ada keterangan di surat undangannya, jadi saya inisiatif sendiri bilang ke petugas, saya tuli, tolong panggil pake isyarat kalau sudah giliran saya” (Wawancara pada Menik Tanggal 10 Januari 2020).

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Hadi dalam wawancaranya pun demikian, berikut hasil wawancara :

“Kalo kesulitan, paling kalau pas lagi di TPS, nunggu nomor, tidak dipanggil, saya tidak tau, pakai mic, saya tidak dengar bagaimana dipanggil. Lebih baik kalo ada layar tv catat nomor antrian, jadi saya bisa lihat oh nomor saya sudah tertera dilayar, jadi saya maju. Kemarin tidak ada, jadi saya tunggu lama” (Wawancara pada Hadi, Tanggal 10 Januari 2020).

Hal tersebut senada dengan apa yang dinyatakan oleh Rian ketika wawancara pada tanggal 10 Januari 2020 yang menyatakan “kalau bahas kesulitan, tuna rungu tidak mengerti kalau dipanggil tidak dengar, antri tunggu lama, lama, harus tanya dulu, sudah apa belum, bukan petugas yang datang, harus kita, gitu yang sulit”.

Kurangnya perhatian dari pihak petugas pemilihan terhadap penyandang disabilitas tuna rungu khususnya pemilih pemula menjadi salah satu masalah yang dihadapi ketika mereka hendak menggunakan hak pilihnya. Dari seluruh narasumber yang telah diwawancarai, mereka berpendapat bahwa kurangnya kepedulian dari petugas Pilkada dalam mengarahkan penyandang disabilitas tuna rungu menjadi salah satu faktor penghambat bagi mereka dalam proses partisipasi politik ketika pemilihan suara berlangsung. Karena kurangnya edukasi kepada pemilih pemula penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tuna rungu atau tuli menjadi salah satu penghambat dalam pemilihan kepala daerah kemarin. Para petugas di lapangan tidak mengetahui bahwa mereka adalah penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli karena secara

fisik mereka tidak memiliki perbedaan dengan orang normal pada umumnya.

No.	NIK	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nama Propinsi	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	TPS										
15	15	202	217	0	419	3	10	13 (3,1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	178	198	0	376	4	7	11 (2,93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17	227	227	0	454	6	16	22 (4,85)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 (0,22)
18	18	268	258	0	526	1	4	5 (0,95)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	341	326	0	607	8	9	17 (2,85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	310	288	0	508	7	7	14 (2,34)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1 (0,17)
21	21	337	328	0	665	5	7	15 (2,26)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1 (0,15)
22	22	267	268	0	535	12	6	16 (3,36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	321	297	0	618	12	5	17 (2,75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	204	210	0	414	12	7	19 (4,59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATA PEMILIH TETAP PUTARAN 1 PILKADA SERENTAK TAHUN 2017

Cari NIK  Nama sri indriani

Show 25 entries Search:

No.	NIK	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Nama Propinsi	Nama Kab/Kota	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	TPS
1	317409*****0002	R.SRI INDRIANI.N	P	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	TANJUNG BARAT	22

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous 1 Next

Keterangan Difabel:

1. Tuna Daksa
2. Tuna Netra
3. Tuna Rungu/Wicara
4. Tuna Grahita
5. Disabilitas lainnya

Gambar 4.6 Daftar Pemilih Tetap Pilkada DKI Jakarta

Sumber : Pilkada2017.kpu.go.id

Berdasarkan dari gambar tabel diatas, terdapat ketidaksesuaian data yang berada di laman *website* KPU dengan data yang berada di lapangan sebenarnya. Berdasarkan contoh tabel diatas, KPU DKI Jakarta masih belum maksimal dalam pendataan penyandang disabilitas. Masih banyak penyandang disabilitas tuna rungu yang belum terdaftar dalam laman tersebut menjadi persoalan yang cukup penting. Selain

permasalahan daftar pemilih tetap yang kurang maksimal, surat undangan sebaiknya ditambahkan kolom label disabilitas agar memudahkan petugas dalam pengarahan ketika pemilihan berlangsung. Karena tanpa adanya informasi keterangan difabel tuna rungu/wicara di dalam kertas surat undangan sehingga banyak petugas yang mengira tidak adanya difabel di TPS tersebut. Mengingat secara fisik mereka normal, dan agak sulit dibedakan dengan orang normal pada umumnya.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017**

Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 baik ketika putaran satu dan dua dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perhatian dari mereka terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula dapat dikatakan cukup beragam. Seperti halnya mengikuti kegiatan kampanye, diskusi politik, komunikasi politik dan pemberian suara ketika Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 berlangsung.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina DKI Jakarta Selatan lebih memiliki pemikiran



yang lebih terbuka dalam menentukan pilihannya ketika Pilkada berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat ketika mereka menggunakan hak pilihnya cenderung berdasarkan hati nurani pribadi masing-masing meskipun dari pihak keluarga ada yang mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka sadar akan menggunakan hak pilih adalah salah satu cara untuk merubah masa depan DKI Jakarta untuk yang lebih baik dan dilakukan dengan tanpa paksaan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh McClosky (Budiarjo 2008:367), partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Bentuk partisipasi politik yang telah dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 sangat berbagai macam. Menurut Roth dan Wilson (dalam Suryadi, 2007: 137), menguraikan bentuk partisipasi politik warga negara berdasarkan intensitas kegiatannya menjadi aktivis, partisipan, pengamat, dan apolitis. Apabila di jenjangkan, intensitas kegiatan partisipasi politik warganegara tersebut akan membentuk segitiga yang menyerupai piramida yang kemudian dikenal dengan istilah “piramida partisipasi politik”. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat dikatakan

bahwa partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 hanya sebatas mengikuti diskusi politik dan menggunakan hak pilihnya, pada partisipasi politik mengacu pada piramida partisipasi politik, mereka berada ditingkat pengamat.

Pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan memiliki harapan agar dengan mereka tidak melakukan golput, mereka turut membantu dalam kemajuan DKI Jakarta melalui program kegiatan serta kebijakan yang nantinya diterapkan pada calon Gubernur dan wakil yang telah mereka pilih ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Surbakti (2010:180), Partisipasi politik adalah salah satu bentuk keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut serta menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Tujuan pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada adalah ingin memilih sesuai dengan apa yang menurut mereka nantinya dapat membawa perubahan Jakarta menuju yang lebih baik dari sebelumnya, serta bisa memperhatikan dan mengutamakan kesetaraan hak-hak

disabilitas, baik disabilitas tuna rungu, tuna netra dan tuna grahita. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Janedjri M. Gaffar (2012:85) pada poin pertama dan poin kedua yaitu, memilih pemimpin daerah yang sesuai dengan masyarakat, sehingga kepala daerah yang terpilih nantinya diharapkan dapat memenuhi dan mewujudkan keinginan masyarakat daerah tersebut, dan melalui penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini diharapkan masyarakat daerah memilih pemimpin dengan berdasarkan visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian di lapangan, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada unsur paksaan atau mereka melakukan dengan sukarela dari pihak manapun untuk memilih pasangan calon ketika Pilkada berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, telah sesuai dengan asas Bebas yang dikemukakan oleh Prihatmoko (2005:110-111) setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan apa kehendak hati nurani dan kepentingannya.

Diskusi politik yang dilakukan oleh pemilih pemula penyandang disabilitas khususnya tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan hanya sebatas membahas secara umum dan membahas tentang hak-hak disabilitas yang dirasa masih kurang dan perlu

dibenahi dengan teman satu komunitas tuna rungu ataupun dengan teman sebayanya, dalam hal ini partisipasi politik yang dilakukan dalam bentuk diskusi politik tidak hanya perseorangan atau individu saja. Sesuai dengan pendapat dari Huntington dan Nelson (1994:21), mengkategorikan usul-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan berpartisipasi politik terdiri dari kelas, kelompok, lingkungan, partai, dan golongan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kesimpulan bahwa mereka melakukan diskusi politik mengenai Pilkada DKI Jakarta berdasarkan Kelas sosial mereka, yaitu organisasi Gerkatina yang beranggotakan khusus disabilitas tuna rungu.

Peran dari Organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan terhadap pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu adalah sebagai sarana untuk memberikan segala informasi terbaru dan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu atau tuli khususnya mengenai Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Tujuan dari organisasi tersebut adalah diharapkan bahwa nantinya pada saat pemilihan berlangsung mereka dapat menekan angka golput ketika pilkada DKI Jakarta tahun 2017, terutama kepada anggota pemilih pemula. Peran lain dari Organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan antara lain adalah mereka mendukung penuh atas hak masyarakat terutama penyandang disabilitas tuna rungu untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang bebas dan adil. Hal-hal tersebut sesuai dengan menurut pengertian organisasi dari Kochler dalam Arni Muhammad (2009:23) mengatakan

bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini tujuan yang dimaksudkan adalah pendidikan politik mengenai Pilkada DKI Jakarta 2017.

## **2. Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017**

Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta pada Tahun 2017 terjadi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Adapun beberapa hal yang menjadi beberapa faktor penghambat bagi mereka. Mengingat bahwa mereka mengalami kekurangan secara fisik, namun mereka memiliki keinginan untuk mempunyai kesetaraan hak yang sama dengan masyarakat lain. Adapun pengertian disabilitas menurut Vash (1981: 22) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan disabilitas adalah terdapat kekurangan secara fisiologis, anatomis maupun psikologis yang disebabkan oleh luka, kecelakaan maupun cacat sejak lahir dan cenderung menetap, dengan kata handicap, mengacu pada rintangan yang dialami individu saat dia berupaya melakukan tugas sehari-hari, yang diakibatkan oleh kekurangan tersebut.

Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta

Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta putaran satu dan dua yang pertama adalah ketika saat pemilihan berlangsung, tidak adanya pendampingan baik dari pihak keluarga atau petugas dan kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut seperti salah satu dari empat faktor yang dikemukakan Maran (2007:156) Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik ketimbang dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik. Berdasarkan status mereka yang memiliki kekurangan secara fisik, mereka merasa bahwa perlu adanya perhatian dari orang disekitar, terutama keluarga dalam membimbing pendidikan politik.

Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang kedua, permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas rungu adalah ketika pemilihan berlangsung adalah tidak mendengar ketika pemanggilan nama serta tidak adanya keterangan jenis kecacatan di dalam surat undangan dari pihak KPU. Mengingat bahwa secara tampak fisik mereka tidak mencirikan bahwa memiliki kekurangan atau mengalami disabilitas rungu. Mereka tidak mendapatkan fasilitas

yang dapat dikatakan memadai saat di lokasi pemilihan seperti pemanggilan menggunakan layar proyektor untuk memudahkan disabilitas tuna rungu. Dikarenakan adanya kurangnya aksesibilitas yang kurang ramah pemilih penyandang disabilitas terutam tuna rungu atau tuli, sehingga tidak dapat memilih secara langsung. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu asas pilkada yang diutarakan oleh Prihatmoko (2005:110-111), Langsung. Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

	<b>SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA KEPADA PEMILIH</b>	<b>MODEL C6-KWK</b>		
<p>Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P *) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota *) yang akan dilaksanakan pada :</p>				
H a r i/Tanggal	:	...../...../.....		
Pukul	:	07.00 s/d 13.00		
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....		
Alamat	:	.....		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Tata cara pemberian suara :</b>            - Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon         </td> <td style="width: 50%; text-align: right; vertical-align: bottom;"> <b>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA K E T U A</b>             (.....)         </td> </tr> </table>			<b>Tata cara pemberian suara :</b> - Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon	<b>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA K E T U A</b>  (.....)
<b>Tata cara pemberian suara :</b> - Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon	<b>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA K E T U A</b>  (.....)			
<p><b>Catatan :</b></p> <p>-Surat Pemberitahuan ini dan KTP agar dibawa pada saat pemungutan suara.          -Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.</p> <p>✂-----<i>gunting disini</i>-----</p>				

Gambar 4.7 Contoh Surat Undangan Pilkada  
Sumber : Kompasiana.com

Selanjutnya, faktor penghambat ketiga adalah minimnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai tata cara pemilihan yang diperuntukkan penyandang disabilitas tuna rungu, serta kurangnya informasi yang tersedia dalam bentuk teks atau tulisan agar membantu untuk memudahkan penyandang disabilitas tuna rungu memahami

kondisi politik dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut, pelaksanaan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 lalu dapat dikatakan tidak sesuai dengan salah satu asas LUBERJUDIL, yakni asas Adil. Berdasarkan menurut pendapat yang dikemukakan oleh Prihatmoko (2005:110-111) Adil, dalam penyelenggara Pilkada setiap pemilih dan calon/peserta Pilkada mendapatkan perlakuan yang sama serta terbebas dari kecenderungan pihak manapun. Kenyataannya di lapangan, dalam pelaksanaan Pilkada pada Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 putaran satu dan dua beberapa waktu lalu, para penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan, terutama pemilih pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilihan tidak merasa adanya keadilan ketika mereka menggunakan hak suaranya. Ketidakadilan yang mereka rasakan adalah dalam bentuk tidak adanya pendampingan dari pihak keluarga ketika pemilihan berlangsung karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara serta pemahaman calon Gubernur dalam Pilkada.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 pada putaran satu dan dua adalah mereka tergolong dalam kelompok pengamat, hal tersebut dibuktikan dengan minimnya intensitas dari partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas yang turut bergabung ke dalam tim sukses para calon Gubernur DKI Jakarta, minimnya partisipasi politik dalam mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh calon Gubernur DKI Jakarta, walaupun beberapa dari mereka ada yang turut mengikuti kegiatan tersebut tetapi sebagian dari mereka cenderung tidak ikut untuk melakukan hal tersebut, dan yang terakhir pemilih pemula penyandang disabilitas lebih cenderung lebih memilih untuk memberikan hak suaranya dan menggunakan hak pilihnya ketika Pilkada berlangsung secara sukarela. Peran dari Organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan terhadap pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu khususnya Jakarta

Selatan adalah sebagai sarana untuk memberikan segala informasi terbaru mengenai Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 baik dalam hal informasi kampanye, hak-hak penyandang disabilitas khususnya tuna rungu atau tuli, dan pendidikan politik lainnya agar dapat menekan angka golput terutama kepada pemilih pemula.

2. Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 pada putaran satu dan dua adalah kurang adanya sosialisasi yang diberikan dari pihak KPU DKI Jakarta menjelang pilkada berlangsung, tidak adanya pendampingan dari pihak keluarga atau petugas TPS, dan kurangnya perhatian dari pihak petugas TPS terhadap penyandang disabilitas tuna rungu.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat diberikan terkait partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas khususnya tuna rungu dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.

1. Diharapkan kedepannya pemerintah lebih memperhatikan terkait sosialisasi pemilihan di kalangan disabilitas agar mereka paham dan tidak kebingungan ketika pemilihan dilaksanakan. Terutama dibutuhkannya interpreter yang memahami bahasa

isyarat agar mempermudah tuna rungu memahami maksud dan tujuan dari sosialisasi tersebut.

2. Diharapkan kedepannya ada label khusus di dalam undangan pemilihan dan/atau DPT yang memberikan informasi bahwa pemilih tersebut memiliki kekurangan secara fisik, sehingga petugas TPS dapat membantu penyandang disabilitas tuna rungu dengan baik, serta pemilih tidak menunggu lama dalam antrian dan juga diharapkan adanya pendampingan untuk pemilih dengan jenis penyandang disabilitas tuna rungu.
3. Diharapkan kedepannya Organisasi DPC Gerkatina Jakarta Selatan dapat membantu para pemilih pemula dalam mensosialisasikan bagaimana cara memilih yang benar ketika pemilihan selanjutnya, kemudian juga nantinya dapat menekan angka golput serta membuat laporan pendataan terbaru mengenai pemilih penyandang disabilitas ke pihak KPU agar mereka dapat memperbarui datanya dengan apa yang ada di lapangan sebenarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Althoff, Michael Rush dan Phillip. 2005. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arbas, Cakra. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. Jakarta: Sofmedia.
- Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, Robert. A. 2001. *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Theory dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. (Alih bahasa: A. Rohman Zainuddin). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Daulay, Zainul. 2013. *Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas*. Makalah, Seminar Sehari. Padang: Auditorium Gubernur Sumatera Barat.
- Effendi, Muhammad. 2006. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Firmanzah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar. M. Janedjri. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta. Konpress
- Gitosudarmo, Indriyo dan Agus Mulyono. 2001. *Prinsip Dasar Manajemen Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE
- Handyaningrat, Soewarno. 1991. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung. Jakarta
- Handoko, T. Hanny. 2006. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Hardjito, Dydiet, 1995, *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*, Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hellriegel, Don. 2001. *Organizational Behavior*, South-Western College Pub.
- Ignatius, Wursanto. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*, Andi Yogyakarta. Yogyakarta
- Maran, Rafael Raga. 2007. *Pengantar Sosisologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Arni. 2004. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep & Implikasinya dalam Perspektif Hukum & Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama, cetakan ketiga.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.

- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pawito. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. 2009. Yogyakarta: Jalasutra
- Prihatmoko, Joko J. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Semarang: LP2I.
- Prihatmoko, Joko. J. 2007. *Men Demokratis Kan Pemilu: Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Semarang, LP3M UN-WAHAS dan Pustaka Pelajar.
- Robbins, P. Stephen. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, 2017. *Sistem Politik Indonesia (Menjelajahi Teori & Praktik)*. Malang: Intrans Publishing.
- Samuel P Huntington dan Joan Nelson, 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Siswanto, Bedjo. (2005). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soemantri, T. Sutjihati. 2006. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhartono. 2009. *“Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada; suatu Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi Banten Jawa Barat)”*. Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Vash, C. L. (1981). *The Psychology of Disability*. New York: Springer Publishing Company Tarmansyah, 2007, *Inklusif Pendidikan Untuk Semua*, Jakarta : Depdiknas
- Warsiki, Endang, dkk. 2003. *Hubungan Antara Kecacatan Fisik Anak dan Depresi Ibu dari Anak-Anak Tuna Daksa*. Surabaya: YPAC.
- Wursanto. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andi

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Modul KPU (Modul I Pemilih Untuk Pemula).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

#### **JURNAL**

- Bramantyo, H. A. (2016). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada Sleman 2015*.

- Fenyapwain, M. M. (2013). Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakas. *Jurnal Acta Diurna*, 2(1).
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA SEMARANG DI KOTA SEMARANG. *Integralistik*, 29(1), 10.
- Muslim, A. (2013). Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (PILGUB) Jabar 2013.” <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel-pdf>.
- Pratiwi, N. V. (2017). PERILAKU POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2015 DI KECAMATAN MOWILA. *XW*, 2(1).
- Rahmat, B., & Esther, E. (2016). Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 25-25.
- Sabatini, A. (2018). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 di Kecamatan Tenayan Raya.

#### **SKRIPSI**

- Amalia, Ilma Nur. 2015. *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pesisir Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 (Studi Masyarakat Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Aprilianti, W. (2016). *Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Tanjungsang Kabupaten Subang* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN).
- Dani, Wahyu Rahma. 2010. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Fathia, Nissa Nurul. 2016. *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*. Lampung: Universitas Lampung.
- Restuida, D. (2017). *TINGKAT KETERLIBATAN PARA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PILKADA KOTA BANDAR LAMPUNG* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Stefani, Amalia. 2018. *Peran dan Upaya KPU Provinsi DKI Jakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Jakarta 2017*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### **INTERNET**

<https://komunita.id/listing/gerakatin-jakarta-selatan/> (12 Januari 2020)

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/08/09/19064141/catatan-penyandang-disabilitas-soal-pelaksanaan-pilkada-dki-2017-> (21 Februari 2019).

<https://nasional.kompas.com/read/2013/07/30/2245368/Hak.Politik.Penyandang.Disabilitas.yang.Dibungkam.> (21 Februari 2019)

<https://nasional.tempo.co/read/1077843/ppua-penca-pemilu-masih-belum-adil-bagi-penyandang-disabilitas/full&view=ok> (21 Februari 2019)

<https://news.detik.com/infografis/d-3391572/data-pemilih-pemula-dan-penyandang-disabilitas-di-pilgub-dki> (21 februari 2019)

<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/> (21 Februari 2019)


<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161108074713-32-171069/kpu-minta-cagub-rancang-kampanye-ramah-penyandang-disabilitas> (21 Februari 2019)

<https://www.kompasiana.com/ajinatha/5cb3d5becc52834f9102f99d/satu-rt-belum-dapat-undangan-pemilu-2019/> (12 Januari 2020)

# LAMPIRAN



## Lampiran 1. Surat Tugas


	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL</b> Gedung C7, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang - 50229 Telp./Fax +62248508006 Laman: <a href="http://fis.unnes.ac.id">fis.unnes.ac.id</a> email: <a href="mailto:fis@unnes.ac.id">fis@unnes.ac.id</a>		
<b>SURAT TUGAS</b> Nomor : B/2899/UN37.1.3/TU/2020			
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan ini memberi tugas kepada Saudara yang tersebut di bawah ini sebagai Panitia Ujian Skripsi.			
No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas/Jabatan
1.	Dr. Moh. Solehatul Mustofa M.A. 196308021988031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2.	Drs. Tijan, M.Si. 196211201987021001	Pembina Utama Muda/IVc	Sekretaris
3.	MOH. ARIS MUNANDAR, S. Sos., M. M. 197207242000031001	Penata Tk. I - III/d	Penguji 1
4.	ERISANDI ARDITAMA, S. I. P., M. A. 198705012018031001	Penata Muda Tk. I - III/b	Penguji 2
5.	Martien Herna Susanti, S. Sos., M. Si. 197303312005012001	Penata Tk. I - III/d	Penguji 3

Untuk menguji skripsi mahasiswa:

Nama : **RETNO HERNINGRUM PRATIWI**  
NIM : 3312415051  
Prodi : Ilmu Politik, S1  
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : **Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017**  
Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2020  
Jam : 09.00 s/d 11.00 WIB  
Tempat : Gedung C4 Lantai 2 Ruang 226  
Pakaian : Atasan : Putih & Blazer Hitam Bawahan : Rok Hitam

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semarang, 13 April 2020

  
Dr. Moh. Solehatul Mustofa M.A.  
NIP. 196308021988031001

Tembusan :  
1. Wakil Dekan Bidang Akademik  
2. Ketua Jurusan PKn  
3. Ketua Lab PKn  
4. **RETNO HERNINGRUM PRATIWI**  
Fakultas Ilmu Sosial UNNES

FM-03-AKD-20/REV.01



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

Gedung C7, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang – 50229  
Telp. +62248508006 Fax. +62248508006 ext 12  
Laman: <http://fis.unnes.ac.id> email: [fis@mail.unnes.ac.id](mailto:fis@mail.unnes.ac.id)

**Lampiran 2. Instrumen Penelitian**

No	Rumusan Masalah	Fokus	Indikator	Pertanyaan	Subjek	Pengumpulan Data
1.	Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?	Bentuk-bentuk partisipasi politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017.	Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anda mengikuti kegiatan kampanye salah satu calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</li> <li>2. Dimana anda mengetahui kegiatan kampanye tersebut?</li> <li>3. Apakah juru kampanye tersebut juga berasal dari kalangan difabel?</li> <li>4. Apakah penting untuk mengikuti kegiatan kampanye salah satu calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</li> </ol>	1. Anggota Gerkatina	Wawancara

				<p>5. Apakah kampanye tersebut memengaruhi anda dalam menentukan pilihan calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</p> <p>6. Apakah kampanye tersebut ramah disabilitas?</p> <p>7. Apakah ada pasangan calon yang melakukan kegiatan kampanye khusus hanya untuk kalangan disabilitas?</p> <p>8. Apakah ada pasangan calon yang memiliki kepentingan difabel di dalam kampanye tersebut?</p>		
			Diskusi Politik	<p>1. Apakah anda pernah berdiskusi tentang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?</p> <p>2. Dengan siapa anda berdiskusi tentang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?</p> <p>3. Apakah anda pernah berdiskusi tentang pemenuhan hak disabilitas dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</p>	1. Anggota GerkatIn	Wawancara

				<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apakah ada pasangan calon yang memiliki program untuk kalangan disabilitas?</li> <li>5. Sejak kapan anda mengikuti diskusi dengan tema politik?</li> <li>6. Apakah anda sering melakukan diskusi dengan keluarga?</li> </ol>		
			Komunikasi Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anda mengetahui visi dan misi calon Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017?</li> <li>2. Darimana anda mengetahui visi dan misi calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</li> <li>3. Apakah anda memahami visi misi yang disampaikan oleh calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</li> </ol>	1. Anggota GerkatIn	Wawancara
			Pemberian Suara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anda menggunakan hak suara pertama anda dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</li> <li>2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU bagi penyandang disabilitas tentang Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</li> </ol>	1. Anggota GerkatIn	Wawancara

				<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Apakah pihak keluarga mengarahkan kepada anda untuk memilih salah satu calon?</li> <li>4. Apakah ada pendampingan dari pihak panitia ketika memilih pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?</li> <li>5. Apakah anda mengalami kesulitan ketika menggunakan hak pilih?</li> <li>6. Apakah terdapat perlakuan khusus dari pihak panitia TPS untuk kaum difabel?</li> <li>7. Apakah ada sarana untuk memilih dari pihak panitia TPS untuk kaum difabel?</li> </ol>		
2.	Apa faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota Gerkatina Jakarta Selatan pada	Faktor penghambat partisipasi politik pemilih pemula penyandang disabilitas tuna rungu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada DKI	Faktor Penghambat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?</li> <li>2. Apa kesulitan yang anda hadapi ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berlangsung?</li> <li>3. Menurut anda, berdasarkan tahapan dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017,</li> </ol>	1. Anggota Gerkatina	Wawancara

	Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?	Jakarta tahun 2017.		manakah yang paling perlu untuk dibenahi kedepannya?		
			Cara Mengatasi Hambatan	1. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan ketika Pilkada berlangsung?	1. Anggota GerkatIn	Wawancara

### **Lampiran 3. Pedoman Wawancara**

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**  
**Anggota DPC GerkatIn Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI**  
**Jakarta Tahun 2017**

A. Identitas informan

Nama :

Usia :

B. Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota dari komunitas ini?
2. Berapa jumlah anggota yang berusia 17-24 tahun?
3. Sejak kapan komunitas ini berdiri?
4. Apakah dapat perhatian dari Pemerintah mengenai sosialisasi pemilu?
5. Jika ada, Apakah anda turut mendampingi anggota ketika sosialisasi pemilu?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**  
**Anggota DPC GerkatIn Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI**  
**Jakarta Tahun 2017**

A. Identitas informan

Nama :

Usia :

B. Pertanyaan

1. Apakah anda mengikuti kegiatan kampanye salah satu calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
2. Darimana anda mengetahui kegiatan kampanye tersebut?
3. Apakah juru kampanye tersebut juga berasal dari kalangan difabel?
4. Apakah penting untuk mengikuti kegiatan kampanye salah satu calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
5. Apakah kampanye tersebut memengaruhi anda dalam menentukan pilihan calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
6. Apakah kampanye tersebut ramah disabilitas?
7. Apakah ada pasangan calon yang melakukan kegiatan kampanye khusus hanya untuk kalangan disabilitas?
8. Apakah ada pasangan calon yang memiliki kepentingan difabel di dalam kampanye tersebut?
9. Apakah anda pernah berdiskusi tentang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?
10. Dengan siapa anda berdiskusi tentang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?
11. Apakah anda pernah berdiskusi tentang pemenuhan hak disabilitas dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
12. Apakah ada pasangan calon yang memiliki program untuk kalangan disabilitas?
13. Sejak kapan anda mengikuti diskusi dengan tema politik?
14. Apakah anda sering melakukan diskusi dengan keluarga?
15. Apakah anda mengetahui visi dan misi calon Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017?
16. Darimana anda mengetahui visi dan misi calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
17. Apakah anda memahami visi misi yang disampaikan oleh calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
18. Apakah anda menggunakan hak suara pertama anda dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
19. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh KPU bagi penyandang disabilitas tentang Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
20. Apakah pihak keluarga mengarahkan kepada anda untuk memilih salah satu calon?
21. Apakah ada pendampingan dari pihak panitia ketika memilih pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?
22. Apakah anda mengalami kesulitan ketika menggunakan hak pilih?



23. Apakah terdapat perlakuan khusus dari pihak panitia TPS untuk kaum difabel?
24. Apakah ada sarana untuk memilih dari pihak panitia TPS untuk kaum difabel?
25. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017?
26. Apa kesulitan yang anda hadapi ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 berlangsung?
27. Menurut anda, berdasarkan tahapan dalam pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, manakah yang paling perlu untuk dibenahi kedepannya?
28. Menurut anda, bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan ketika Pilkada berlangsung?

#### **Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi**

**PEDOMAN DOKUMENTASI**  
**Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**  
**Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan Pada Pilkada Gubernur DKI**  
**Jakarta Tahun 2017**

**Hal yang di Dokumentasikan :**

1. Foto dokumentasi kartu anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan
2. Foto kondisi kantor DPC Gerkatina Jakarta Selatan
3. Susunan keanggotaan DPC Gerkatina Jakarta Selatan

## Lampiran 5. Susunan Pengurus DPC Gerkatin Jakarta Selatan

 <p>DPC JAKARTA SELATAN</p>	<p><b>DEWAN PENGURUS CABANG</b> <b>GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA</b> <b>( DPC GERKATIN )</b> Indonesia Associations for the Welfare of the Deaf (IAWD) CABANG : JAKARTA SELATAN PROPINSI : DKI JAKARTA SEKRETARIAT PUSAT : Jl. Tanjung 9 No.6 RT.012/RW.002, Perum. Rancho Indah, Kel.Tanjung Barat, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530 E-mail : dpcgerkatinjktseletan@gmail.com &amp; SMS : +62 818 196 800</p>
<b>SUSUNAN PENGURUS</b> <b>DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) JAKARTA SELATAN</b> <b>PERIODE 2017 - 2021</b>	
<b>DEWAN PENGURUS CABANG (DPO)</b>	
<b>KETUA</b>	: PUTI IRRA PUSPASARI
<b>SEKRETARIS</b>	:
<b>PENGURUS INTI :</b>	
<b>KETUA</b>	: SRI INDRIANI.N
<b>WAKIL KETUA</b>	: SUTAN IRWANSJAH
<b>SEKRETARIS</b>	: RENNY NAZIR
<b>BENDAHARA</b>	: DIAN NOVITA
<b>SEKSI-SEKSI BIDANG :</b>	
<b>SEKSI PENDIDIKAN</b>	: KETUA TIM : AJIE WICAKSONO ANGGOTA : NADIRA CHAERANI
<b>SEKSI KETENAGAKERJAAN</b>	: KETUA TIM : HERMININGSIH ANGGOTA : HIDJRIYAH R
<b>SEKSI KEPEMUDAAN</b>	: KETUA TIM : DEA HERDIANSYAH ANGGOTA : WAHYU ICHLASUL AMAL
<b>SEKSI OLAH RAGA</b>	: KETUA TIM : ACHAMD SOFYAN ANGGOTA : ISMAIL LUBIS
<b>SEKSI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)</b>	: KETUA TIM : MEIKY KURNIAWAN ANGGOTA : TAUHIDAH
<b>SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	: KETUA TIM : WIDA SETIANTI ANGGOTA : DESY MELLYANA N
<b>SEKSI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI</b>	: KETUA TIM : PANJI SURYA PUTRA ANGGOTA : ADE YULIANTI
<p>Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan Susunan Organisasi adalah <b>Dewan Pengurus Cabang Gerkatin Jakarta Selatan</b> kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.</p> <p>Jakarta, 10 April 2018</p> <p><b>KETUA DPC GERKATIN</b> <b>Jakarta Selatan</b></p> <p></p> <p><b>SRI INDRIANI N</b></p> <p>Tembusan Yth :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Umum DPP Gerkatin</li><li>2. Ketua DPO DPD GERKATIN DKI Jakarta</li><li>2. Arsip</li></ol>	

## Lampiran 6. Hasil Wawancara

### HASIL WAWANCARA Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

**Nama : Sri Indriani. N**  
**Ketua DPC Gerkatina Jakarta Selatan**

- Penanya : perkenalkan nama saya Tiwi, dari Unnes Semarang. Boleh tanya dengan ibu siapa?
- Narasumber : ibu Ninik, ketua Gerkatina Jakarta Selatan.
- Penanya : boleh minta waktu sebentar, sudah berapa lama menjadi pengurus?
- Narasumber : baru jalan 1 tahun, sebelumnya masih wakil ketua. Karena ketuanya itu tidak aktif sudah tiga tahun otomatis saya naik jadi ketua baru jalan satu tahun. Sebetulnya dapat 4 tahun, 3 tahun masih ketua, setahun saya naik jadi ketua.
- Penanya : berarti pengganti ya, mau tanya, anggota seluruh di Gerkatina Jakarta Selatan berapa?
- Narasumber : anggota dari Gerkatina Jakarta Selatan sudah ada sekitar 58 orang anggota, dan bukan belum termasuk yang non anggota dan yang masih pelajar, masih banyak tuna rungu yang berada di Jakarta Selatan dan belum bergabung menjadi anggota dari Gerkatina.
- Penanya : kalau anggota muda yang waktu itu ikut pilkada gubernur DKI Jakarta 2017 berapa orang?
- Narasumber : yang muda-muda pada ikut organisasi kepemudaan. Tapi disini ada sekitar 10 orang kalo gak salah.
- Penanya : kalau gerkatina kegiatannya apa saja?
- Narasumber : waktu saya aktif, ada pengajaran isyarat sama universitas Veteran, terus lomba 17 Agustus, pelatihan make up, hari disabilitas.
- Penanya : sudah berapa lama gerkatina berdiri?
- Narasumber : kalo Jakarta Selatan, baru jalan 17 tahun yang lalu. Kalau barat lain, 24 tahun lain lain.
- Penanya : kalau ada sosialisasi tentang pemilu, ada atau tidak?
- Narasumber : ada, seperti *workshop* sosialisasi pemilu, bencana alam,
- Penanya : dari mana narasumber sosialisasinya?
- Narasumber : dari Depsos, Sudin Walikota.
- Penanya : kalau pemerintah perhatian atau tidak kepada komunitas, terutama dengan hak-hak disabilitas?
- Narasumber : ada sebagian perhatian, ada sebagian tidak, banyak yang belum kasih lengkap, belum. Sudah perhatian seperti tenaga kerja, paling banyak umur-umur seperti 20 sampai 30 tahun. Banyak yang 35 ke atas yang nganggur. Ada bantuan pelatihan, ada bantuan modal

usaha. Ohiya seperti teks di tempat umum juga belum, di tempat pembuatan SIM juga belum, jadi susah.

Penanya : waktu pemilu 2017, waktu Anies, Ahok, Agus ada kampanye gak?  
 Narasumber : waktu gerkatim aktif bagus, waktu Fauzi Bowo, semua bagus. Ada bantuan disabilitas, waktu Jokowi menjadi Gubernur, kurang, terus Ahok cukup bagus, tapi karena non muslim, jadi jatuh, pernah waktu itu campur, waktu itu gak papa islam masuk ke gereja, hati saya gak sesuai. Terus ketika Anies, bagus, ada bantu tapi waktu saya ada acara ICDM sulit, mungkin ada halangan lain,

Penanya : waktu kalau ada acara kampanye, ibu ikut damping atau tidak?  
 Narasumber : waktu kampanye pemilu, gak ikut. Teman lain ikut,  
 Penanya : kalau mengenai perjuangan hak-hak disabilitas, lebih baik saat ini atau gimana?  
 Narasumber : enggak, masih belum setara, maunya semua disabilitas, yang tuna rungu mau bekerja seperti umum, pemerintah masih kurang, kita rungu seperti normal, gausah disabilitas grahita duluan. Terus komunikasi terus berulang-ulang. Pemerintah malas, nanti belakangan, normal, disabilitas, baru rungu. Saya berusaha terus, tapi tidak bisa cepat. Seperti kerja, SMA umum normal, tuna rungu S1 tapi gaji lebih rendah, normal SMA gaji nya bisa tinggi. katanya karena komunikasi. Maunya setara, bisa sama.

Penanya : pernah ada sosialisasi dari pemerintah atau tidak bu?  
 Narasumber : Sekarang kalau dari KPU gak ada, dulu pernah satu kali, waktu zaman Fauzi Bowo, dia berasal dari pihak KPU tapi gak bisa bahasa isyarat, jadi kami gak paham apa maksudnya. Dulu belum ada banyak interpreter seperti sekarang ini

Penanya : terus kalau harapan nanti kedepan buat pemilu?  
 Narasumber : waktu pemilu, enggak apa, kurang, ga bagus. Harus sungguh-sungguh. Pemerintah harus memperhatikan disabilitas. Perhatikan paling utama disabilitas. Seperti dulu ada sosialisasi dari pemerintah. Tapi tidak bisa bahasa isyarat, jadi kita gak paham. Semoga aja nanti sosialisasi ada yang bahasa isyarat, karena percuma kalo tidak bisa, kita gak paham

**HASIL WAWANCARA**  
**Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**  
**Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI**  
**Jakarta Tahun 2017**

**Nama** : Muhammad Firdaus Hadi  
**Usia** : 19 Tahun  
**Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan**

Penanya : selamat malam, nama saya Tiwi dari Unnes, nama kamu siapa?  
Narasumber : Nama saya Hadi  
Penanya : umur berapa kalau boleh tau?  
Narasumber : 19 tahun  
Penanya : berarti kemarin pemilu pertama ketika pilkada ya?  
Narasumber : iya betul.  
Penanya : mau tanya sedikit boleh?  
Narasumber : ya boleh.  
Penanya : apa pernah mengikuti kampanye ketika pilkada berlangsung?  
Narasumber : saya tidak ikut kampanye, tapi saya tau dari teman-teman juga kalau ada kampanye di Rumah salah satu calon pada waktu itu, tapi saya memilih tidak hadir, karena percuma saja kalau ikut kampanye, sebelum terpilih bisa dekat sama kami (disabilitas) nanti setelah terpilih biasanya lupa. Tapi mungkin teman-teman lain ada yang ikut, tapi saya belum tertarik untuk ikut kampanye, belum ada keinginan untuk kampanye kampanye seperti itu.  
Penanya : tapi tau ada kampanye?  
Narasumber : iya saya tau.  
Penanya : tau darimana info?  
Narasumber : dari bapak.  
Penanya : oh berarti yang memberitahu info tersebut bapak ya, dimana ada kampanye?  
Narasumber : iya, bapak yang beri info.  
Penanya : kalau temen-temen ikut kampanye tidak?  
Narasumber : mungkin, mungkin ikut soalnya rumahnya berjauhan jadi lain-lain.  
Penanya : kalo boleh tau, kenapa tidak ikut kampanye?  
Narasumber : karena saya belum tertarik untuk ikut kampanye, belum ada keinginan untuk kampanye kampanye seperti itu.  
Penanya : kalo misal, menurut kamu, penting atau tidak ikut kampanye?  
Narasumber : sebenarnya penting, cuman buat apa ya, buat teman-teman semua, teman-teman tuli biar oh seperti ini, biar paham tentang pemilu itu apa.  
Penanya : oo begitu, menurut kamu, ada atau tidak calon gubernur yang memperjuangkan hak-hak disabilitas?  
Narasumber : ada,  
Penanya : seperti apa contoh?

Narasumber : ya mungkin, saya belum liat untuk tuli, tapi untuk disabilitas daksa, mungkin tangga, kalo untuk tuli belum lihat.

Penanya : kalo menurut kamu, ada gak pasangan calon gubernur kemarin, yang memiliki kepentingan khusus untuk penyandang disabilitas?

Narasumber : untuk tuli, belum ada.

Penanya : terus, kamu pernah gak diskusi mengenai pilkada?

Narasumber :Iya kadang-kadang, sama teman-teman, misal sedang kumpul-kumpul, ngomong-ngomong tentang Pilkada, ya cuma ngobrol sekedar bagaimana cara memilih, tapi bukan bahas yang lebih dalam, soalnya nanti takut berantem kalo beda pandangan.

Penanya : oh beda pendapat gitu ya.

Narasumber : iya.

Penanya : kalau dari keluarga?

Narasumber : komunikasinya sesekali aja, tidak begitu sering.

Penanya : kalau orang tua menyuruh untuk memilih salah satu pasangan calon tidak?

Narasumber :kalau keluarga saya sih jarang bahas gitu, tapi kalau untuk mengarahkan pilih salah satu calon gak ada, keluarga saya bilang terserah kamu mau pilih siapa aja, kalau dari keluarga sih palingan cuman ngasih tau, nanti coblos caranya gini, cuman gitu aja sih gak ada suruh pilih 1 atau 2 atau 3.

Penanya : kalau diskusi sama teman-teman, diskusi tentang pemenuhan hak hak disabilitas pernah atau enggak?

Narasumber : diskusi, soal pemenuhan hak disabilitas contoh saat ceramah solat jumat andai ada interpreter, saya gak paham ngomong apa, apa tidak bisa. Gak paham.

Penanya : oh iya ketika solat jumat ya, kalau gitu, ada gak pasangan calon yang memiliki program untuk kalangan disabilitas?

Narasumber : ada ada,

Penanya : seperti apa?

Narasumber : sekarang ada interpreter di tv, mungkin kedepannya ada interpreter atau tv ketika ceramah sholat jumat.

Penanya : kamu sering gak diskusi politik sama teman-teman?

Narasumber : ya sesekali. Cuma liat tv, misal satu atau dua minggu sebelum coblos, Cuma dikit-dikit. Kalau ada temannya saya ikut nonton

Penanya : oh, kalau begitu ada pendampingan baru mengikuti berita ya?

Narasumber : iya seperti itu.

Penanya : kalau sama keluarga sering atau tidak?

Narasumber : enggak. Kalau nonton tv jarang politik, kurang suka.

Penanya : kalau kamu, tau atau tidak visi misi dari calon gubernur kemarin?

Narasumber : Iya saya tau sedikit-sedikit, saya fokus sama yang mengangkat hak-hak disabilitas, saya paham sedikit tapi masih rasanya kurang paham.

Penanya : tapi kamu paham soal visi misi mereka?

Narasumber : ya paham sedikit sedikit.

Penanya : kemarin, kamu menggunakan hak suara atau tidak?

Narasumber : ya, ya saya pakai hak suara saya, karena teman-teman bilang jangan sampai golput. Cuma butuh 5 menit untuk 5 tahun kedepan

Penanya : sulit atau tidak?

Narasumber :Kalo kesulitan, paling kalau pas lagi di TPS, nunggu nomor, tidak dipanggil, saya tidak tau, pakai mic, saya tidak dengar bagaimana dipanggil. Lebih baik kalo ada layar tv catat nomor antrian, jadi saya bisa lihat oh nomor saya sudah tertera dilayar, jadi saya maju. Kemarin tidak ada, jadi saya tunggu lama.

Penanya : waktu pencoblosan, ada pendampingan atau tidak? Dari petugas TPS atau keluarga mungkin?

Narasumber : tidak ada, paling Cuma dipanggil sama keluarga kalau nama saya sudah dipanggil.

Penanya : kemarin sebelum pencoblosan, ada sosialisasi atau tidak, dari KPU mungkin?

Narasumber : sosialisasi gak ada, tapi mungkin bisa jadi ada tapi saya tidak tau. Kayaknya teman-teman juga tidak ada info, saya tau cara memilih diajarin sama bapak

Penanya : berarti tidak dikasih tau cara coblos itu gini caranya, gitu?

Narasumber : tidak. Atau mungkin ada tapi saya tidak tau kalau diluar.

Penanya : kamu kemarin waktu pencoblosan, sulit atau tidak?

Narasumber : tidak.

Penanya : ada perlakuan khusus atau tidak, karena kamu tuli?

Narasumber : tidak ada. Cuma ada perlakuan khusus kepada disabilitas yang menggunakan kursi roda, atau tuna netra.

Penanya : kalau harapan kamu apa kedepannya dari pilkada yang kemarin?

Narasumber : seperti yang saya bilang tadi, kalo bisa ada layar untuk nomor antrian supaya saya tidak menunggu lama dan saya mengerti kalau dipanggil.

Penanya : menurut kamu, dari tahapan pilkada, apa harapan kamu kedepannya?

Narasumber : khusus saya yang tuli, bisa ada pendampingan petugas, dan juga kalau Cuma pakai pengeras suara saya tidak paham.



**HASIL WAWANCARA**  
**Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**  
**Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI**  
**Jakarta Tahun 2017**

**Nama** : Nurul Widad Apriani Putri  
**Usia** : 22 Tahun  
**Anggota Gerkatina Jakarta Selatan**

Penanya : halo, selamat siang, saya Tiwi dari Unnes mau wawancara tentang pilkada kemarin, boleh tanya namanya siapa?  
Narasumber : panggil aja saya Menik.  
Penanya : Usia saat ini berapa?  
Narasumber : umur saya 22 tahun.  
Penanya : oo.. kemarin pilkada coblos untuk pertama kali?  
Narasumber : iya.  
Penanya : boleh tanya sebentar?  
Narasumber : iya boleh boleh.  
Penanya : Apakah anda mengikuti kegiatan kampanye salah satu calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017?  
Narasumber : ya saya pernah ikut kampanye pada salah satu calon, tapi Cuma sekedar ikut-ikutan teman-teman tuna rungu saja. Saya tau info ada kampanye karena saya masuk organisasi Gerkatina, nah saya tau info kampanye dari situ, dari grup *WhatsApp* yang dikirim anggota lainnya, disana juga ada juru kampanye yang berasal dari non-difabel yang bisa bahasa isyarat, jadi saya sedikit paham, saya pribadi setelah mengikuti kegiatan kampanye yang khusus untuk disabilitas kemaren, cukup memengaruhi pilihan politik saya, kalo ditanya penting atau tidak itu kampanye saya tidak tau, saya ikut-ikut teman-teman doang.  
Penanya : Kalau untuk juru kampanye, dari tuna rungu atau lainnya?  
Narasumber : maksud itu apa?  
Penanya : seperti interpreter.  
Narasumber : interpreter ada, interpreter normal, bukan difabel, bukan.  
Penanya : lalu, kampanye kemarin, memengaruhi pilihan kamu atau tidak?  
Narasumber : ya, ya.  
Penanya : ohiya, apakah kampanyenya ramah untuk disabilitas atau tidak?  
Narasumber : kampanyenya kalo ada interpreter, saya bisa paham. Kalau ada interpreter, itu aja.  
Penanya : apakah calon gubernur waktu itu ada yang kampanye khusus untuk disabilitas, bukan campur?  
Narasumber : ada, ada.  
Penanya : kamu ikut?  
Narasumber : ikut.  
Penanya : apa ada pasangan calon yang punya kepentingan untuk disabilitas terutama tuna rungu?

Narasumber : ada ada.

Penanya : terus, pernah diskusi politik?

Narasumber : saya pribadi kurang banyak tanya, Cuma kalau temen-temen begitu banyak sih yang bahas mengenai Pilkada, saya cukup tau, kalo sama keluarga jarang, sebab pilih beda. Saya biasanya cuma temen-temen aja, kita melakukan perbandingan dan juga kedepannya kita juga ingin mampu untuk disetarakan bahwa disabilitas bisa seperti orang lain, cuma yang membedakan ya kita punya kekurangan aja dan mungkin ada keterbatasan, makanya hal tersebut sering dibahas, mudah-mudahan pemerintah atau dinas lain dapat memperhatikan disabilitas lebih baik

Penanya : terus kalo ngobrol, diskusi dengan teman-teman, atau keluarga tentang pilkada?

Narasumber : kalo sama keluarga itu jarang ngobrol tentang pilkada gitu gitu, soalnya pilihan kami soal calon pemimpin gubernur sudah beda. Saya ngobrol sama teman-teman aja.

Penanya : oo sama teman-teman aja. Kamu tau visi-misi calon gubernur kemaren?

Narasumber : waktu dulu tapi, saya tau apa isi visi misi mereka, saya tau dari TV, atau cari internet, tapi sekarang sudah lupa. Udah lama soalnya. Tapi seingat saya sedikit-sedikit paham. Tapi ada juga yang belum paham betul-betul.

Penanya : tapi kamu paham maksud dari visi misi?

Narasumber : sedikit sedikit paham.

Penanya : kemaren, menggunakan hak suara atau tidak?

Narasumber : iya, aku ikut

Penanya : bagaimana?

Narasumber : bagaimana apa?

Penanya : seperti ada sosialisasi dari KPU atau tidak?

Narasumber :oo tidak ada, saya tidak pernah ada tau sosialisasi dari KPU, tapi kalau cara coblos waktu itu ada relawan datang ke kami, kemudian dia ngasih tau cara coblos. Saya bingung gimana nanti, saya tanya kepada sodara atau keluarga saya.

Penanya : terus, kalau dari keluarga disuruh untuk memilih salah satu calon seperti suruh coblos satu pasangan atau tidak?

Narasumber : iya iya, ada yang suruh pilih ini itu haha.Iya, ada orang tua suruh pilih salah satu calon, tapi saya cuman bilang iya nanti saya pilih, tapi di TPS saya memilih apa yang saya mau pilih

Penanya : kamu kemarin pakai hak suara kamu pas pemilu?

Narasumber : iya saya pakai hak suara saya, karena saya ingin ikut berpartisipasi minimal dalam pemberian suara, supaya tidak golput.

Penanya : trus, apakah ada pendampingan dari pihak TPS untuk kamu memilih, di dampingi, ada atau tidak?

Narasumber : tidak ada pendampingan, yang ada pendampingan cuman tuna netra sama tuna daksa doang, tuli gak ada, gitu, padahal kita juga gak paham gimana cara (memilih)

Penanya : ohh tidak ada ya. Trus cara petugas tau kalo kamu itu disabilitas rungu dari mana?

Narasumber : oo, tidak ada, tidak ada, tuli tidak ada Cuma datang, trus mas, saya tuli nanti tolong panggil ya, tidak dengar, oh iya, gitu doang, tidak ada pendampingan, tidak ada.

Penanya : petugas disana tidak tau ya kamu tuna rungu?

Narasumber : petugas tidak tau kalo saya tuna rungu, tidak ada keterangan di surat undangannya, jadi saya inisiatif sendiri bilang ke petugas, saya tuli, tolong panggil pake isyarat kalau sudah giliran saya

Penanya : susah atau tidak saat coblos?

Narasumber : iya sedikit, kadang tidak paham, dulu tidak paham bagaimana caranya coblos seperti coblos yang mana, saya tidak tau gitu, tapi karena keluarga kasih tau terus organisasi ada yang kasih tau ohiya paham, begitu, tapi tidak semua temen-temen tau gitu.

Penanya : terus, apakah ada perlakuan khusus dari anggota di TPS?

Narasumber : tidak ada, sama aja, Cuma itu gara-gara aku bilang tuli, tolong panggil, iya iya, sudah gitu doang.

Penanya : terus, kalo faktor penghambat apa? Faktor penghambat sebagai tuli pas pemilu pilkada kemarin?

Narasumber : apa, KPU gaada kasih tau gimana caranya coblos, biar paham, banyak teman-teman tidak paham gitu apalagi waktu datang ke TPS tanya, memang tidak ada pendamping khusus untuk tuli, tidak ada Cuma inisiatif sendiri ngomong, saya tuli, gitu doang, gitu.

Penanya : di DPT, tau DPT?

Narasumber : apa itu?

Penanya : Daftar Pemilih Tetap, tidak ada keterangan kalau kamu tuna rungu?

Narasumber : Tidak ada, Cuma tau ada masuk disabilitas Cuma tuna netra, sama tuna daksa, tuli gak ada. Gitu.

Penanya : apa harapan kamu untuk kedepannya, pemilu bagaimana?

Narasumber : ya aku mau, pemerintah dari KPU memberikan apa seperti program, contoh organisasi-organisasi tuli, buat sosialisasi bagaimana caranya, pemilu, karena banya teman-teman tidak ngerti pemilu gimana cara, harusnya pilih siapa tidak tau, makanya harus pemerintah sosialisasi pemilu kepada teman-teman tuli, sosialisasi gitu. Sama di tv, Cuma dikasih tau tapi tidak mengerti. Sekarang Alhamdulillah, sudah ada interpreter.

Penanya : seperti sosialisasi pemerintah dan lebih perhatian kepada tuli.

Narasumber : iya betul.

Penanya : oo begitu, terima kasih.

Narasumber : iya sama-sama

**HASIL WAWANCARA**  
**Partisipasi Politik Pemilih Pemula Penyandang Disabilitas Tuna Rungu**  
**Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan pada Pilkada Gubernur DKI**  
**Jakarta Tahun 2017**

**Nama** : Taufik Indrianto  
**Usia** : 20 Tahun  
**Anggota DPC Gerkatina Jakarta Selatan**

Penanya : Selamat siang. Nama saya Tiwi, Unnes, Semarang, nama siapa?  
Narasumber : Selamat siang, Nama saya Rian.  
Penanya : oo Rian, usia berapa?  
Narasumber : saya 20  
Penanya : ooh 20 tahun ini, boleh tanya sebentar tentang kemarin pilkada, kamu coblos pertama kali?  
Narasumber : iya.  
Penanya : boleh tanya sedikit?  
Narasumber : iya boleh.  
Penanya : apa kamu kemaren ikut kampanye?  
Narasumber : oo, enggak saya tidak ikut-ikutan.  
Penanya : tapi tau ada kampanye?  
Narasumber : saya tau ada kampanye, tapi belum paham buat apa kampanye, tapi mungkin ada pengaruh dalam memilih, setelah paham maksud dari calon gubernur tersebut dalam kampanye nya  
Penanya : oo tau tapi tidak ikut kenapa?  
Narasumber : enggak papa, males aja hehe, saya kurang tertarik buat dunia politik lebih dalam.  
Penanya : menurut kamu, penting atau tidak kampanye itu?  
Narasumber : ya mungkin penting untuk orang-orang coblos gitu, mungkin.  
Penanya : tapi, kamu tidak ikut?  
Narasumber : ya, haha. Belum paham mau ngapain.  
Penanya : menurut kamu, kampanye memengaruhi atau tidak dalam kamu memilih?  
Narasumber : memengaruhi.  
Penanya : tapi kemarin ada atau tidak sosialisasi untuk disabilitas?  
Narasumber : ada,  
Penanya : kamu hadir?  
Narasumber : tidak ikut,  
Penanya : tapi teman teman?  
Narasumber : teman-teman ikut, teman-teman kasih tau saya.  
Penanya : terus, pernah gak diskusi tentang pilkada?  
Narasumber : biasanya sih ya, saya itu ikut diskusi sekedar ya bahas tentang kebutuhan disabilitas, seperti jalanan untuk tuna netra, terus rambu tertulis untuk tuna rungu. Jujur saya sendiri gak banyak mengikuti perkembangan politik, kalau ada momen seperti pemilihan saya tertarik.

Penanya : ngobrol sama siapa biasanya? Kakak atau adik atau siapa?  
 Narasumber : sama keluarga semua kebanyakan.  
 Penanya : sama teman-teman?  
 Narasumber : iya teman-teman juga sama.  
 Penanya : terus, pernah diskusi tentang perjuangan hak-hak disabilitas?  
 Narasumber : iya, sama keluarga, teman-teman tuna rungu.  
 Penanya : kira-kira ada atau tidak pasangan calon yang fokus untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas tuna rungu?  
 Narasumber : ada.  
 Penanya : seperti apa contohnya?  
 Narasumber : seperti fasilitas kebutuhan disabilitas, seperti jalanan orang tuna netra itu, terus rambu tertulis untuk tuna rungu, gitu.  
 Penanya : kamu sejak kapan mengikuti diskusi politik?  
 Narasumber : sejak dulu, sudah lama.  
 Penanya : sering ngobrol politik sama teman-teman?  
 Narasumber : tidak.  
 Penanya : kalau untuk pilkada kemarin, Ahok, Agus, Anies, apa kamu paham visi misinya?  
 Narasumber :saya sih kurang paham, tapi saya tau visi dan misinya pada saat itu ya ada beberapa paham ada yang tidak paham.  
 Penanya : kamu tau darimana visi misinya?  
 Narasumber : tau dari debat di televisi.  
 Penanya : kamu nonton debat?  
 Narasumber : iya.  
 Penanya : kemarin, pemilu kada, kamu punya hak suara atau tidak?  
 Narasumber : punya.  
 Penanya : terus, apa ada sosialisasi dari KPU?  
 Narasumber : tidak ada, tapi ada dari khusus dari organisasi gerkatina kasih tau, kalo gimana caranya coblos, tapi kalau dari KPU tidak ada.  
 Penanya : oh berarti ada sosialisasi tapi dari kalangan biasa?  
 Narasumber : iya.  
 Penanya : trus kalau keluarga, suruh kamu untuk pilih satu, atau dua, atau tiga, atau tidak, terserah kamu saja mau pilih yang mana?  
 Narasumber : iya betul, ibu dan bapak saya sangat suka sama salah satu calon dari salah satu partai, saya secara tidak langsung disuruh untuk memilih pasangan calon tersebut, tapi saya diam saja. Tidak bilang iya dan tidak  
 Penanya : oo.. ada disuruh pilih, terus ketika coblos ada pendampingan atau tidak dari petugas?  
 Narasumber : pendamping, mungkin kalau gak ngomong, gak dikasih tau gitu, Cuma yang menggunakan kursi roda kalo tuna rungu gak dapat, mungkin kedepannya bisa dapat.  
 Penanya : kemaren, kamu pakai suara kamu untuk coblos pas pilkada?  
 Narasumber : iya pasti saya ikut coblos, soalnya sayang, ini kesempatan kita untuk memberikan suatu perubahan, terutama untuk DKI Jakarta

sendiri. Semoga nanti amanah sesuai dengan apa yang dijanjikan dulu

Penanya : kemaren, waktu milih ada kesulitan atau tidak?

Narasumber : sulit, seperti, apa, gak paham, apa itu.

Penanya : oh mungkin kurangnya sosialisasi?

Narasumber : iya begitu.

Penanya : oo, berarti tidak ada perlakuan khusus?

Narasumber : tidak ada, mungkin kalau temanku ada.

Penanya : terus, kalau faktor penghambat ketika pemilu apa?

Narasumber : ya mungkin, tidak ada bantuan bagaimana cara untuk tuna rungu coblos, atau ketika dipanggil tidak dengar apa-apa, mungkin harusnya petugas bisa bantu saya, begitu.

Penanya : kamu sudah ngomong kepada petugas TPS?

Narasumber : iya, harusnya bisa lebih membantu tuna rungu. Bukan Cuma yang menggunakan kursi roda saja.

Penanya : lalu kalau kesulitan ketika pemilihan apa?

Narasumber : kalau kesulitan, tuna rungu tidak mengerti informasi-informasi, trus kalau dipanggil tidak dengar, antri tungguanya lama, lama, harus tanya dulu, bukan petugas yang datang. Harus kita, Gitu yang sulit.

Penanya : terus, kalau untuk harapan, dari tahapan-tahapan pemilihan gubernur apa?

Narasumber : harapan-harapan, ya semoga bisa gubernur pada saat pemilu ada dapat terwujud untuk disabilitas tuna rungu khususnya. Karena, saya tuna rungu juga tidak bisa dengar, jadi harus berupa visual, seperti interpreter dan tulisan-tulisan untuk memperkuat, apa sih itu.

Penanya : kalau solusi untuk pemilu apa?

Narasumber : solusinya, ya mungkin panitia atau KPU bisa ada tulisan khusus untuk tuna rungu, misal saya tuna rungu, ada tulisan, oh iya bisa dibantu, seperti kemarin tidak tulisan tuna rungu atau kebutuhan khusus tidak ada, jadi panitia tidak tau, kalau saya tuna rungu, mereka tidak tau, atau kalau pakai kursi roda, atau buta kelihatan cirinya. Gitu. Kalau tuna rungu tidak tau.

Penanya : terima kasih atas waktunya.

Narasumber : sama-sama.